PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG PAJAK DAN ZAKAT DAN RELEVANSINYA PADA KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh:

FIKI RIYANI

NIM 1705026060

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seluruhnya, dengan ini saya mengirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Fiki Riyani

NIM : 1705026060

Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Pajak Dan Zakat Dan Relevansinya Pada Kebijakan Fiskal Di Indonesia**

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Desember 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Imam Yahya, M. Ag	**Dessy Noor Farida, SE. M. Si. AK CA**
NIP. 197004101995031001	NIP. 197912222015032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Prof DR.HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

PENGESAHAN

Nama : Fiki Riyani

NIM :1705026060

Judul : Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Pajak Dan Zakat Dan Relevansinya Pada Kebijakan Fiskal Di Indonesia

Telah dimunaqasyahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dinyatakan telah lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 23 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelarsarjana (Strata satu/S1) pada Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 03 Januari 2022

Mengetahui,

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Sokhikhatul Mawadah, M.E.I	**Dr. H. Imam Yahya, M. Ag**
NIP. 198503272018012004	**NIP. 197004101995031001**
Penguji Utama I	Penguji Utama II
Dwi Swasana Ramadhan, M. SEI	**Arif Afendi, S.E., M. Sc.**
NIP. 199403032019031014	**NIP. 198505262015031002**
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Imam Yahya, M. Ag	**Dessy Noor Farida, SE. M. Si. AK CA**
NIP. 197004101995031001	**NIP. 197912222015032001**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGOSEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl.ProfDR.HAMKA(kampusIII)NgaliyanTelp/Fax(024)7601291,7624691.Semarang

Nomor: B-1218Un.10.5/D.1/PP.00.9/03/2020 31 Maret2020
Lamp : -
Hal : Penunjukan menjadi
Dosen Pembimbing Skripsi

KepadaYth. :
Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Uin Walisongo
Di Semarang

AssalamualaikumWr.Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama	: FikiRiyani
NIM	: 1705026060
ProgramStudi	: EkonomiIslam
JudulSkripsi	: Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang Pajak dan Zakatdan Relevansinya pada Kebijakan Fiskal di Indonesia

Maka, kami mengharap kesediaanya Saudara untuk menjadi pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setujui masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadapjudul, kerangka pembahasan danpenulisan.
2. Pembumbing dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisanskripsi

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai pembimbing II Saudara/I Dessy Noor Farida, SE., M.Si., Akt

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Waalaikumussalam Wr.Wb

Kementerian Agama Republik Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik.

NUR FATONI

Tembusan :
1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلوٰتك سكن لهم والله سميع عليم

“Ambillah zakat (pajak) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

(Q.S At-Taubah: 103)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi robbil alamin, puji syukur hamba haturkan kepada Alloh SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi agung nabi Muhammad SAW.

Dari hati yang terdalam, usaha yang tulus, perjuangan serta pengorbanan. Maka penulis persembahkan skripsi ini untuk segenap orang yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rohabid dan Ibu Ajijah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Kakak tercinta, Siska Apriyani dan Widiyanti Komalasari yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
3. Kampus yang sangat menjunjung pengetahuan dan peradaban UIN Walisongo, beserta para dosen dan civitas akademik UIN Walisongo
4. Para kerabat dan teman-teman yang tak pernah lelah untuk memberi semangat

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2021

Deklator



Fiki Riyani

1705026060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi merupakan hal yang sangat penting dalam skripsi, karena pada umumnya banyak menggunakan istilah arab, judul buku, nama orang, nama lembaga dan lain sebagainya yang kata aslinya ditulis arab diganti dengan huruf latin. Penulisan transliterasi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 054b/U/1987. Transliterasi ini digunakan sebagai pedoman supaya penulisan yang konsisten. Pedoman transliterasi adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	S	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Z	م	M
ر	R	ن	N
ز	‘Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ء	‘
ص	S	ى	Y
ض	D		

B. Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

اى = Ay

اَوْ = Aw

D. Syaddah

Syaddah melambangkan dengan huruf konsonan yang ganda, contohnya **الطبّ** *al-thib*

E. Ta' Marbuthah

Setiap Ta' Marbuthah dituliskan dengan "h", contohnya **الطبيعية المعشةْ** = *al-ma'isyah al-thabi'iyyah*

F. Kata Sandang(...ال)

Kata sandang (**...ال**) ditulis al-...contohnya **الصناعة** =al-shina'ah. Kata al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada awal kalimat.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi zakat dan pajak apabila ditinjau dari trilogi fungsi kebijakan fiskal dan bagaimana prospek penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode *library research*. Data primer diperoleh dari buku "Pajak itu Zakat" karya Masdar Farid Mas'udi dan UU mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sementara data sekunder berasal dari buku-buku dan literasi pendukung lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pajak dan zakat apabila dilihat dari fungsi stabilitas, alokasi dan distribusi atau biasa disebut dengan trilogi fungsi kebijakan fiskal, keduanya merupakan perpaduan yang saling menyempurnakan dan penting dalam penstabilan ekonomi. 2) Prospek penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia, kemungkinan akan ada peningkatan tarif pajak yaitu jumlah wajib pajak akan meningkat, kelompok miskin akan terbantu, akan ada persyaratan bagi lembaga yang mengelola zakat, baik BAZ ataupun LAZ, untuk menjalankan standar tata kelola yang baik, yaitu *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (kewajaran).

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Zakat, Pajak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Segala puji bagi Alloh tuhan semesta alam, yang selalu memberikan taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat enyelesaikan skripsi yang berjudul "Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Zakat dan Pajak dan Relevansinya pada Kebijakan Fiskal". sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada nabi kita Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di *yaumil qiyamah* nanti. Aamiin. Penyusunan skripsi hingga titik ini tentunya melibatkan banyak pihak yangikut membantu, baik itu bantuan waktu, tenaga, ide, saran, kritik dan bahkan materi yang mampu membawa penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rohabid dan Ibu Ajijah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang,
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saifulloh, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang,
4. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang,
5. Bapak Nurudin, SE, MM. Selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang,
6. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dessy Noor Farida, SE, M. Si, AK CA, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa mencurahkan waktu, tenaga dan terpenting ide, kritik, dan saran pada penyusunan skripsi ini,
7. Segenap tenaga pendidik dan seluruh staff akademik yang senantiasa membantu proses belajar, mencurahkan pengetahuannya, serta tak lekang memberi motivasi, dan kontribusi lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu hingga terbentuk karya skripsi ini,
8. Seluruh teman seangkatan, terutama Mba Aini, Mba Hani, Mba fiya, Mbak Riska dan Mba Malinda, Mas Samsul, Mba Rifkha, dan Mba Lulu yang selalu membantu, mendukung dan berkontribusi dalam proses penulisan skripsi ini.

9. Teman-teman santri Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Semarang terutama Azmi, Anik, Mba Fatma, Mba Nafis, Mba Mili, Mba Iftah, Mba Puji yang menjadi teman berdiskusi yang asyik dan teman bercanda yang menyenangkan.

Tegal, 02 Desember 2021

Penulis,



Fiki Riyani

1705026060

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
LEMBAR PENGESAHAN.....iii
MOTTO..... iv
PERSEMBAHAN..... v
DEKLARASI.....vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... viii
ABSTRAK..... x
KATA PENGANTAR..... xi
DAFTAR ISI.....xii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan Masalah..... 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 7
D. Telaah Pustaka..... 8
E. Metode Penelitian.....10
F. Sistematika Penulisan.....11
BAB II TINJAUAN TENTANG PAJAK DAN ZAKAT.....13
A. Gambaran Umum Zakat.....13
1. Pengertian Zakat.....13
2. Dasar Hukum Zakat.....14
3. Macam-Macam Zakat.....16
4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....18
5. Manfaat Zakat.....22
6. Hikmah Zakat..... 23
B. Gambaran Umum Pajak..... 24
C. Gambaran Umum Kebijakan Fiskal.....35
1. Pengertian Kebijakan Fiskal.....35
2. Jenis Kebijakan Fiskal.....36
3. Instrumen Kebijakan Fiskal.....36

4. Fungsi Kebijakan Fiskal.....37
5. Tujuan Kebijakan Fiskal.....37
BAB III PEMIKIRAN MASDAR FARID MASUDI TENTANG ZAKAT DAN PAJAK...41
A. Biografi Singkat Masdar Farid Mas'udi.....41
B. Konsep Pajak dan Zakat Menurut Masdar Farid Mas'udi.....41
BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....50
A. Fungsi Instrumen Pajak dan Zakat dalam Kebijakan Fiskal.....50
1. Pajak sebagai fungsi kebijakan fiskal.....50
2. Zakat Sebagai Fungsi Kebijakan Fiskal.....51
B. Prospek Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal Di Indonesia.....54
BAB V PENUTUP.....58
A. Kesimpulan.....58
B. Saran.....59
DAFTAR PUSTAKA.....60
LAMPIRAN.....63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....69

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dalam kegiatan kehidupan khalayak. Sehingga, perekonomian menjadi satu diantara tolak ukur kesejahteraan hidup. Ekonomi mikro dan makro, keduanya adalah bagian dari ekonomi. Makroekonomi adalah studi tentang kegiatan ekonomi suatu negara, sedangkan ekonomi mikro adalah studi tentang perilaku individu dalam perekonomian.[1]

Salah satu kebijakan ekonomi makro yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pertama kali muncul disebabkan oleh adanya dorongan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. metode memperbaiki pembelanjaan dan pendapatan negara ini disebut sebagai kebijakan fiskal.[2]

Di Indonesia, kebijakan fiskal bersumber dari peraturan perundang-undangan bukan bersumber dari hukum agama. Namun, bukan berarti kebijakan fiskal di Indonesia bertentangan dengan tujuan hukum agama, hal ini karena kebijakannya yang didasarkan pada landasan hukum serta peraturan perundang-undangan yang ideal serta konstitusional yaitu Pancasila dan UUD 19445 tetap memiliki eksistensi agama juga berarti aturan tuhan.[3]

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang termasuk dalam instrumen kebijakan fiskal di Indonesia dan merupakan urunan wajib seseorang untuk kas negri berdasarkan perundang-undangan (enforceable) serta tidak menerima balasan (kontraprestasi) yang secara langsung diungkapkan dan pemnggunaannya untuk pembayaran pembelanjaan umum.[4] Pajak memiliki dua fungsi yakni fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Adapun maksud dari fungsi anggaran adalah "pajak berperan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur yakni pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial."[5]

---

[1] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 1

[2] Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam: pendekatan teoritis dan sejarah*, cet. Ke 2 (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 213

[3] Supangat, *Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Economica, Vol. IV, Edisi 2, November 2013, hal. 98

[4] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2018, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), hal.3

[5] Ibid., hal. 4

Kewajiban perpajakan telah di atur dalam undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah direvisi dengan undang-undang No. 16 Tahun 2000.[6] Sedangkan dalam al-quran yang menjadi landasan hukum pajak, terdapat dalam QS.Al-Anfal: 41 yang berbunyi :

واعلموااانما غنمتم من شيئ فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتمى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله ومآ انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعن والله على كل شيئ قدير

Artinya: *"ketahuilah, sesungguhnya seperlima untuk alloh, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada alloh dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan alloh maha kuasa atas segala sesuatu."*

Menurut kementrian keuangan, jumlah pajak yang terkumpul sampai tahun 2020 sebanyak Rp 1.070 triliun. Jumlah ini sebanding dengan 89,3% dari target APBN sebesar 1.198,8 triliun rupiah. Hal ini berarti terdapat kesenjangan pendapatan pajak (defisit) pada tahun 2020 ini sebesar 128,8 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, bahwa realisasi penerimaan pajak Rp 1.070 triliun mengalami penurunan sebesar 19,7%.[7]

Selain itu, adanya kebocoran penerimaan pajak yang masuk ke kas negara membuat semakin berat kondisi penerimaan pajak yang belum mencapai target. Seperti halnya pada kasus penangkapan oknum RW, Direktur Operasional PT DC oleh DJP Kemenkeu, atas kecurangannya dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kasus ini terjadi karena adanya pemalsuan faktur pajak yang dilakukan oleh oknum RW yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak pertambahan nilai yang terutang pada kas negara serta dilaporkan kepada otoritas pajak.[8] Dengan kurangnya pendapatan dalam penerimaan pajak, maka diperlukan adanya instrumen pendukung guna menambah sumber pendapatan negara. Instrumen pendukung ini bisa dilakukan melalui penerimaan dana zakat.

Zakat menjadi salah satu tonggak yang mampu menumbuhkan ekonomi publik. Sudut pandang zakat bukan hanya bersifat ibadah ritual, namun juga mencakup sudut pandang aspek sosial, finansial, pemerataan,kesejahteraan. Zakat adalah komponenutama dalam kerangka moneter publik dan kebijakan fiskal utama dalam

---

[6] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2018, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018), hal. 26-27

[7] https://money.kompas.com/read/2021/01/06/201315826/penerimaan-pajak-sepanjang-2020-capai-rp-1070-triliun-masih-kurang-rp-1288?page=all di akses pada tanggal 07/01/2021 pukul 09.36

[8]https://money.kompas.com/read/2020/08/07/114100226/palsukan-faktur-pajak-wajib-pajak-ini-divonis-penjara-dan-denda-rp-20-5-miliar?page=all di akses pada tanggal 07/01/2021 pukul 10.18

sistem ekonomi islam. Zakat adalah aktivitas wajib bagi seluruh muslim dan menjadi satu diantara faktor yang membentuk pendapatan nasional dan pendistribusiannya kepada kelompok asnaf.[9]

Dalam islam, Zakat sebagai salah satu alat kebijakan fiskal yang dalam praktiknya lebih diorientasikan ke arah distribusi kekayaan yang berkeadilan. Karena esensi masalah ekonomi adalah terletak pada bagaimana pendistribusian harta dan jasa menjadi seimbang, sehingga akan menciptakanmekanisme distribusi ekonomi yang adil. Zakat juga ditujukan untuk saling berbagi, mengambil dari orang-orang yang mempunyai harta yang lebih dan memberipada orang yang kekurangan harta.[10]

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fiqhuz Zakat, kata dasar zakat berarti "bertambah (ziyadah) dan tumbuh, menumbuhkan (an-numuw), sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman itu ‘zaka’ berarti tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut ‘zaka’ berarti bertambah" .[11] Sedangkan secara terminologi, "zakat berarti mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah Alloh swt wajibkan untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan kadar tertentu, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya."[12]

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, menyebutkan bahwa pengertian zakat, yakni sebagai: *“harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”*. Maksudnya bahwa kewajiban zakat tidak hanya untuk perseorangan namun juga badan usaha.[13]

Pada masa awal Islam, zakat merupakan salah satu sumberkeuangan negara dan berperan aktif dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Perintah wajib berzakat mal ini sudah ada sejak awal perkembangan islam (sebelum hijrah), akan tetapi pada saat itu masih belum di tentukan jenis harta apa atau sampai sejauh mana harta yang harus dizakati, berupa jumlah zakat dan mustahiqnya (hanya untuk orang-orang yng kurang mampu saja). Barulah pada tahun ke-2 H, jenis harta yang wajib dizakati serta besaran nilai zakat

---

[9] Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam: pendekatan teoritis dan sejarah*, cet. Ke 2 (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 90

[10] Ali murtadho, *Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis*, Jurnal Economica, volume IV, Edisi 1, Mei 2013, hal. 47-48

[11] Gus Arifin, Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hal. 4

[12] Qodariah Barkah, dkk, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf, edisi pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hal. 4

[13] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), hal. 6

dari harta masing-masing ditentukan secara terperinci. Dan dalil naqli tentang kewajiban zakat, disebutkan 32 kali dalam al-quran. Salah satunya dalam surah at-taubah (9): 103.[14]

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلوٰتك سكن لهم والله سميع عليم

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Alloh maha mendengar lagi maha mengetahui".

Dalam buku Keuangan Publik Islam karya Nurul Huda, setidaknya ada tiga aspek yang terkait dengan pemenuhan kewajiban zakat. *Pertama*, dari segi moral dan psikologis, untuk situasi ini, diharapkan zakat dapat memberantas kerakusan dan ketamakan seseorang yang cenderung mencintai hartanya. *Kedua,* dari sudut sosial, dalam situasi ini zakat memiliki peran sebagai alat khusus yang di berikan oleh islam guna mengilangkan tingkat kekurangan/kemiskinan dalam masyarakat dan sekaligus membuat orang kaya sadar akan kewajiban sosial yang dipaksakan oleh agama kepada mereka. Dan *ketiga,* dari segi finansial, disini zakat digunakan untuk menangkal penimbunan harta benda pada segelintir orang dan menekan ketidak-seimbangan ekonomi di masyarakat. [15]

Zakat dan pajak mempunyai persamaan yakni keduanya merupakan bagian dari pendapatan wajib zakat dan wajib pajak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Namun hal ini memunculkan adanya dualisme kewajiban yang dibebankan kepada umat islam, yaitu kewajiban sebagai seorang muslim untuk menjalankankan rukun islam yang ketiga yakni membayar zakat dan kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak.[16] Sehingga persoalan ini menuntut adanya pengelolaan yang tepat.

Dalam pengelolaannya, pajak dan zakat dikelola oleh lembaga yang berbeda, yakni di Indonesia tata kelola pajak terbagi menjadi 2, yaitu *pertama*, tata kelola pajak dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan *kedua,* tata kelola pajak dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pengelolaan zakat

---

[14] Gus Arifin, Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hal. 23-24

[15] Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam: pendekatan teoritis dan sejarah*, cet. Ke 2 (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 111

[16] Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 23.

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibangun oleh masyarakat.[17]Untuk mencegah penyimpangan dan kegiatan pengelolaan oleh amil, sanksi pidana diterapkan dalam Undang-undang Pengelolaan Zakat. Sanksi pidana berupa kurungan paling lama lima tahun, dan atau denda lima ratus juta. Sementara itu, akan ada hukuman pidana 1 tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah untuk lembaga atau amil yang tidak memiliki izin untuk mengelola zakat dari instansi yang berwenang.[18]

Adanya perbedaan lembaga pengelolaan ini, menimbulkan ketidaksinkronan antara pajak dan zakat, diantaranya *pertama*, pemerintah tidak dapat menggunakan harta zakat untuk membiayai kegiatannya, karena pengelola zakat memberikan langsung kepada penerima zakat, haltersebut memicu adanya dualisme kegiatan yang dibiayai dengan zakat namun juga dibiayai oleh APBN yang bersumber dari pajak. *Kedua*, sebagian besar penghimpunan zakat BAZNAS dan LAZ adalah zakat pendapatan, padahal masih banyak jenis zakat yang bisa dihimpun, namun belum bisa dijangkau oleh BAZ maupun LAZ.[19] Selain itu, rendahnya penghimpunan zakat yang disebabkan oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dikarenakan masih tingginya praktik korupsi saat ini.[20]

Adanya masalah dualisme kewajiban yang dihadapkan kepada kaum muslim, membuat Masdar Farid Mas'udi mengungkapkan pemikirannya dalam sebuah buku berjudul Pajak itu Zakat, bahwa *"Agama dan negara itu dua perkara yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Agama sebagai visi tidak akan ada artinya tanpa negara sebagai wadah aktualisasinya. Begitupun sebaliknya, negara sebagai wadah kekuasaan tidak boleh terpisah dengan agama sebagai visi illahiah untuk keadilan bagi semua."*[21]Maksudnya, agama menjadi spirit, ruh illahiyyat yang memberikan arahan kepada negara yang sebagai badannya atau kelembagaan yang profan. Sehingga negara itu akan menciptakan sebuah keadilan yang merata, terutama bagi kaum yang lemah dan terpinggirkan.

---

[17] Muhammad Rheza Ramdhan, *Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia*, Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8 No. 1 1 Januari-Juni 2017, Hal. 78

[18] Aris Puji Purwatiningsih dan Muchlis Yahya, *Why Zakat Collection in Indonesia is not as Effective As It is in Malaysia,* Jurnal Penelitian, Vol. 14, No. 1, Februari 2020, hal. 33

[19] Muhammad Rheza Ramdhan, *Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia*, Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8 No. 1 1 Januari-Juni 2017, hal 78-79

[20] Aris Puji Purwatiningsih dan Muchlis Yahya, *Why Zakat Collection in Indonesia is not as Effective As It is in Malaysia,* Jurnal Penelitian, Vol. 14, No. 1, Februari 2020, hal. 40

[21] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hal. 167

Pemikiran ini diaplikasikan dengan adanya penyatuan zakat dan pajak, dimana zakat bagaikan roh yang merasuk pada pajak sebagai badannya. Roh dan badan tidak mungkin dipisahkan. Maksudnya apabila seseorang telah membayar zakat (pajak) kepada pemerintah, maka kewajibannya sudah di anggap gugur atau terpenuhi.[22] Dengan kata lain zakat sebagi teori sedangkan pajak sebagai prakteknya.[23]

Menurutnya dalam buku pajak itu zakat, bahwa terdapat dua komponen yang sangat penting dalam ajaran zakat : "*Pertama,* ajaran terkait dengan pemungutan biaya publik (akhdz al-shadaqah) oleh lembaga negara dari warga negara yang berkemampuan, yang dikenal sebagai pajak. *Kedua,* ajaran terkait dengan pengeluaran (tasharruf) biaya publik untuk tujuan redistribusi kesejahteraan, terutama kepada yang kurang mampu dan biaya kebaikan bersama (sabilillah) untuk semua orang".[24]

Sedangkan terkait tentang siapa yang mengamili (memungut dan mengurus) zakat (pajak), menurut masdar mas'udi bahwa negara/pemerintah adalah pihak yang paling tepat, karena negara memiliki kekuasaan resmi yang bersifat memaksa (forced power), sehingga zakat (pajak) akan di tasharruf-kan oleh negara untuk kemaslahatan bersama, khususnya pihak-pihak yang lemah dan tidak punya.[25]

Pemikiran beliau tentang adanya penyatuan zakat dan pajak bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk kebijakan zakat dan pajak di Indonesia. Meskipun cara berpikirnya terkadang agak ekstrim, beliau selalu mengutamakan kepentingan semua orang. Kemudian, relevansi dalam kebijakan fiskal di Indonesia adalah dengan ditetapkannya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pernyataan ini terdapat pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pada Pasal 9 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa *"Pengeluaran-pengeluaran terntentu tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh WP orang pribadi pemeluk agama islam dan/atau WP badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada badan Amil Zakat atau lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah".* Ketentuan ini menetapkan bahwa zakat penghasilan yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZ/LAZ dapat mengurangi besarnya penghasilan kena pajak.

---

[22] Ibid., hal 136

[23] Gus fahmi, Pajak Menurut Syariah, edisi Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 186

[24] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hal 158

[25] Ibid., hal 129-130

Ketetapan ini merupakan langkah awal pemerintah dalam meminimalisir beban para muzaki yang sekaligus sebagai wajib pajak dalam membayar pajak dan zakat. Namun, zakat yang dibayarkan oleh muzakki tidak secara langsungmengurangi pajak melainkan mengurangi penghasilan bruto.[26] Sehingga pembayaran zakat disini dapat disamakan dengan biaya sosial (social cost) seperti sumbangan keagamaan sosial, perayaan hari besar, dan sejenisnya yang dipersamakan dengan sumbangan wajib keagamaan. Hal ini seakan mengecilkan makna zakat sebagai sumber pendapatan negara dimasa pemerintahan Rasulullah SAW, khulafaurrasyidin, dan para khalifah sesudahnya.[27]

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut, peneliti hendak menggali dan menganalisa mengenai pemikiran tentang pajak dan zakat menurut Masdar Farid Mas'udi dan relevansinya pada kebijakan fiskal di Indonesia. Penggalian ini dilanjutkan dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi zakat dan pajak apabila ditinjau dari trilogi fungsi kebijakan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi?
2. Bagaimana prospek penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Berdasarkan rumusan masalah yang hendak peneliti dalami, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
    1. Untuk mengetahui fungsi zakat dan pajak apabila ditinjau dari trilogi fungsi kebijakan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi
    2. Untuk mengetahui prospek penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia
b. Kegunaan Penelitian
    1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan diharapkan berguna sebagai referensi para peneliti selanjutnya dibidang yang sama.
    2. Secara praktis

---

[26] Gus fahmi, Pajak Menurut Syariah, edisi Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 192
[27] Ibid., hal. 296

a. Bagi masyarakat, berguna untuk menjadi rujukan dalam memahami tentang konsep zakat pengurang pajak di Indonesia
b. Bagi penulis, berguna untuk menambah wawasan penulis, dan sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang jurusan Ekonomi Islam

D. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian terdahulu yang memusatkan kajian pada pemikiran Masdar Farid Mas'udi. Penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan oleh Usfiyatul marfu'ah dengan judul *Gagasan Masdar Farid Mas'udi Tentang Pajak Itu Zakat (Studi Analisis Manajemen Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat)* hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan masdar masudi tentang pajak itu zakat bukanlah tentang persoalan teknis zakat, tetapi tentang paradigma sosial dan filosofinya. Sedangkan aspek teknis itu adalah konsekuensi dari paradigma sosial dan filosofinya tentang zakat sehingga akan mempengaruhi teknis sistem pengelolaan zakat.[28]

Selanjutnya tesis karya Muhammad Redha Anshari dengan judul "*Harmonisasi Peraturan Zakat Dan Pajak Dalam Hukum Indonesia (Studi Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak)"* hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan zakat sebagai pengurang pajak terbagi menjadi dua periode, yakni pertama periode UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan kedua periode UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ketentuan zakat sebagai pengurang pajak tidak sepenuhnya mengurangi beban muzakki terhadap pengenaan beban ganda, tetapi hanya sedikit mengurangi beban pajak itu sendiri.[29]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sofia Fuadah dan Arif Afendi, yang berjudul "*Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzaki di BAZNAS Kabupaten Semarang),"* menyimpulkan bahwa zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perorangan mampu memberikan dampak positif, yakni semakin banyak muslim yang membayarkan zakat dan pajaknya, karena sudah tidak dibebankan lagi oleh adanya beban ganda yang harus ditanggung. Selain itu juga ketetapan ini menjadi alternatif

---

[28] Usfiyatul Marfu'ah, Skripsi: *Gagasan Masdar Farid Masudi Tentang Pajak itu Zakat (StudiAnalisis Manajemen Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat),* Semarang : IAIN Walisongo, 2011, hal. 94

[29] Muhammad Redha Anshari, Tesis : *Harmonisasi Peraturan Zakat dan Pajak dalam hukum Indonesia (Studi Tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak),* Yogyakarta: UII, 2016, hal. 124

untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.[30] Namun penerapan ini masih relatif rendah, karena masih banyak yang belum tahu akan kebijakan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan kurangnya sosialisasi dari pihak BAZNAS kepada masyarakat. selain itu kurangnya rasa percaya terhadap lembaga pengelola zakat yang menjadi salah satu kendala penerapan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perorangan di BAZNAS Kabupaten Semarang.[31]

Selanjutnya skripsi karya Liliyana dengan judul "*Kewajiban Penyatuan Pajak Dan Zakat Dalam Pandangan Didin Hafidudin Dan Masdar Farid Mas'udi,"* hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya persamaan dan perbedaan tentang penyatuan pajak dan zakat menurut pandangan didin hafidudin dan masdar masudi. Persamaannya adalah menimbag adanya kepentingan kemaslahatan dan keadilan untuk keseluruhan, dan mengurangi beban adanya kewajiban double tax bagi umat islam. Perbedaannya, didin hafidudin menganggap bahwa pajak dan zakat itu berbeda baik dalam tujuannya maupun segi manfaatnya. Selain itu, lembaga pengelolaan zakat dan pajak itu dilakukan secara terpisah, karena membayar zakat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat muslim. Sedangkan pendapat masdar masudi bahwa pajak dan zakat itu harus disatukan sebagaimana ruh dengan badan atau jiwa dengan raga. Sehingga dalam penerapannya pun harus disatukan, yakni sama-sama dikelola oleh negara.[32]

Selanjutnya jurnal karya Taufiq Hidayat, yang berjudul *"Menimbang Pemikiran Masdar Farid Masudi Tentang Double Taxs (zakat dan Pajak)",* yang menyimpulkan bahwa masih banyak yang beranggapan bahwa pajak dan zakat bila disamakan maka akan menurunkan pendapatan pajak dan meningkatkan penerimaan zakat. Padahal di negara Malaysia, dengan diberlakukannya zakat sebagai bagian dari setoran pajak ternyata menambah jumlah penerimaan pajak, begitupun dengan penerimaan zakat.[33]

---

[30] Sofia fuadah dan Arif Afendi, *Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzaki di BAZNAS Kabupaten Semarang),* Jurnal At-Taqaddum, vol. 11, No. 2, November 2019, hal. 162-163

[31] Sofia fuadah dan Arif Afendi, *Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzaki di BAZNAS Kabupaten Semarang),* Jurnal At-Taqaddum, vol. 11, No. 2, November 2019, hal. 156-157

[32] Liliyana, Skripsi: *kewajiban penyatuan pajak dan zakat dalam pandangan didin hafidudin dan masdar farid masudi,* Lampung : UIN Raden Intan, 2018

[33] Taufiq Hidayat, *MenimbangPemikiran Masdar Farid Masudi Tentang Double Taxs (zakat dan Pajak).* Jurnal Economica, Vol. IV, Edisi 2, November 2013, hal. 87

Apabila dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang pemikiran masdar mas'udi tentang pajak dan zakat dalam buku karangan beliau yang berjudul pajak itu zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini yakni tentang prospek penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia.

E. Metode Penelitian

a. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang studi dan kumpulan berbagai jenismateri empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, pengakuan introspektif, kisah hidup, wawancara, berbagai teks dan produksi kultural, pengamatan, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual.[34]

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan, artinya dalam memecahkan masalah, penelitian ini menggunakan data-data yang relevan dari perpustaakan saja seperti buku, majalah, catatan dan lain-lain tanpa memerlukan riset lapangan.[35]

b. Sumber data

Apabila dilihat dari sumber data, pemeltian ini menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber yang secara langsung memberikan data kepada peneliti.[36] Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah buku karangan Masdar Farid Mas'udi yakni "Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat", selain itu penulis juga menambahkan UU mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data pada peneliti, yang berhubungan dengan tema penelitian baik berupa

---

[34] Septiawan Santana k., *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal. 5

[35] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Pustakan Obor Indonesia. 2014), hal. 2

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 137

buku, jurnal, skripsi, tesis dan lain-lain. Sumber sekunder yang digunakan penulis untuk menambah referensi yakni:

a. Buku Pajak Menurut Syariah karangan dari Gus Fahmi
b. Buku Keuangan Publik Islam karangan Nurul Huda dkk
c. Buku Perpajakan Edisi Revisi 2018 karangan Mardiasmo
d. Buku Ensiklopedia Rukun Islam Zakat karangan Syarif Hidayatullah
e. Buku Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf karangan Elsi Kartika Sari
f. Dan jurnal, artikel, skripsi, serta buku lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi. Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan dalam tinjauan ini adalah dokumen, khususnya melakukan pencarian dan pengumpulan informasi sebagai sumber informasi penting dan sumber informasi opsional, baik sebagai catatan, tulisan, gambar, atau karya besar seseorang.

d. Metode analisa data

Penelitian ini menggunakan metode analisis, yakni menganalisis tentang pemikiran masdar masudi tentang pajak dan zakat kemudian dilihat relevansinya pada kebijakan fiskal di Indonesia, lalu diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan penelitian ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan sistematis, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan dan analisis data penelitian, telaah penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah gambaran umum tentang zakat yang memaparkan pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, tujuan zakat, jenis zakat, dan hikmah zakat. Kemudian penulis akan memaparkan gambaran umum tentang pajak yang meliputi pengertian dan dasar hukum pajak, fungsi pajak dan ciri-ciri pajak, teori-teori

pemungutan pajak dan pembagian pajak. Selanjutnya penulis akan memaparkan tentang gambaran umum tentang kebijakan fiskal.

Bab III adalah membahas tentang; biografi singkat Masdar Farid Mas'udi dan konsep pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang pajak dan zakat.

Bab IV dalam bab ini penulis memaparkan fungsi zakat dan pajak sebagai alokasi, fungsi zakat dan pajak sebagai distribusi, dan fungsi zakat dan pajak sebagai stabilisasi. Selanjutnya penulis juga membahas tentang prospek penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan sebagai alternatif kebijakan fiskal di Indonesia.

Bab V yaitu penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan hasil penelitian dan juga saran.

BAB II
TINJAUAN TENTANG PAJAK DAN ZAKAT

A. Gambaran Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menjadi satu diantara rukun islam yang ke-3 dan termasuk salah satu ibadah utama yang harus ditunaikan oleh kaum muslim. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fiqhuz Zakat, "kata dasar zakat berarti bertambah (ziyadah) dan tumbuh, menumbuhkan (an-numuw), sehingga dapat dikatakan bahwa tanaman itu 'zaka' berarti tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut 'zaka' berarti bertambah."[37] Sedangkan secara terminologi, "zakat berarti mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah Alloh swt wajibkan untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan kadar tertentu, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya" .[38] Selain itu kata زكى juga memiliki arti membersihkan, bertumbuh dan berkah.[39] Dinamakan zakat karena dengannya harta kita akan bertambah menjadi berkah dan alloh menggantikannya dengan pahala di akhirat[40], sebagimana firmannya:

وما أنفقتم من شيئ فهو يحلفه وهو خير الرازقين

"Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka alloh akan menggantinya, dan dialah sebaik-baiknya pemberi rezeki".(Q.S Saba' : 39).

Dibawah ini beberapa definisi zakat dari beberapa ulama:

a. Ulama Hanafiyyah (mazhab Hanafi) mendefinisikan *"zakat sebagai hak untuk memiliki sebagian harta tertentu dan untuk individu tertentu yang sudah dikendalikan secara syara' karna alloh"*
b. Ulama Syafiiyah (Madzhab Syafi'i) mendefinisikan *"zakat sebagai nama bagi sesuatu yang diserahkan dan harta atau badan pada jalan tertentu"*

---

[37] Gus Arifin, Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hal. 4

[38] Qodariah Barkah, dkk, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf, edisi pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hal. 4

[39] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* (Jakarta: Kencana, 2003), hal 37

[40] Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dalil-Dalil Keutamaan),* (Jakarta: PT Elex Media, 2016), hal. 3

c. Ulama Hanabilah (Madzhab Hambali) mendefinisikan bahwa *"zakat adalah hak wajib atas harta tertentu untuk sekelompok tertentu pada waktu tertentu."*[41]

d. Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa "*zakat adalah menyumbangkan sebagian dari harta yang sejenis yang sudah sampai nishab dalam setahun dan memberinya kepada orang fakir dan semisalnya yang bukan dari Bani Hasyim dan Bani Mutholib"*

e. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa "*zakat adalah pemberian bagian tertentu dari harta yang berkembang apabila telah mencapai nishab untuk tujuan tertentu".*[42]

f. Zakat menurut Dr. Yusuf Qardhawi, yakni *"bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Alloh wajibkan untuk diberikan kepada mustahiqqin (mereka yang berhak menerima zakat)".*[43]

g. Pengertian zakat berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 pasal 1 ayat 2, bahwa "*zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya"*[44]

Dari beberapa pendapat tersebut, bisa dipahami bahwa arti dari zakat secara terminologi ialah bagian dari harta tertentu yang harus diberikan oleh muzakki kepada kelompok tertentu menurut syara' yang sudah sampai satu nishab dalam setahun.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang ketiga, yang merupakan dasar dari islam yang agung. Kewajiban membayar zakat diperintahkan langsung dalam al-qur'an, as-sunah, disertai dengan pernyataan berdasarkan kesepakatan para ulama. Alloh SWT berfirman:

وما امرو الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفآء ويقيموا الصلوٰة ويؤتوا الزكوٰة وذالك دين القيمة

---

[41] Ibid., hal. 4

[42] Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2018), hal.4

[43] Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 6

[44] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hal.15

Artinya: *"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus"*. (Q.S Al-Bayyinah: 5)

Demikian juga dengan sabda rasulullah SAW, yang artinya:

"Islam dibangun diatas lima dasar,bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allahdan Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, menegakkan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Romadhon". (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama Salafiyah telah memberikan penjelasan tentang kewajiban zakat, sebagaimana dijelaskan Abdullah Al bassam, bahwa kewajiban zakat didefinisikan dalam tiga tingkatan, yaitu:[45]

1) Zakat wajib secara absolut, tanpa batas atau secara rinci. Ini adalah tugas untuk memberi, yaitu menjaga dan mencapai sesuatu yang bermanfaat. Kondisi ini terjadi ketika Nabi masih berada di Mekah atau sebelum hijrah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an az-Zariyat ayat 19, yang artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". Selain itu, Allah juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang enggan membayarzakat dalam surat fushilat ayat 7:

   الذين لا يؤ تون الزكوٰة وهم بالاخرة هم كافرون

   Artinya: "(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat".
2) Baru setelah tahun kedua Hijriyah Allah memperjelas hukum zakat secara lebih rinci. Allah menjelaskan jenis harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya dan berapa nisabnya, dan jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya.
3) Selanjutnya, pada saat itu, pada tahun kesembilan Hijriyah, banyak individu yang masuk Islam dan ruang Islam menjadi lebih luas, Nabi SAW mengirim pejabat untuk mengumpulkan zakat, dan mengirim sahabat-sahabatnya ke Yaman.

[45] Ibid., hal. 15

Para ahli fiqih bersepakat bahwa zakat ialah diwajibkan untuk setiap orang islam yang merdeka,dewasa,berakal dan mempunyai satu nisab penuh dari hartanya.

3. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua jenis yakni zakat jiwa (nafs) yang biasa dikenal dengan zakat fitrah dan zakat mal (harta). Di bawah ini adalah penjelasan terkait zakat fitrah dan zakat mal:

1) Zakat fitrah ialah zakat wajib bagi setiap individu muslim, pria atau wanita yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.[46] arti lain dari zakat fitrah ialah bahwa zakat mempunyai kewajiban mengembalikan umat islam kepada kesuciannya, dengan memfitrahkan jiwanya dari dosa mereka akibat imbas pertemanan yang bebas dan lainnya sehingga mereka melencong dari fitrahnya.[47] dibawah ini ialah ketentuan yang mewajibkan seseorangmembayar zakat fitrahnya:
   a. Orang-orang yang mempunyai makanan atau harta benda yang lebih dari kebutuhan lingkungan mereka pada malam dan pagi hari raya
   b. Bayi yang baru lahir sebelum menjelang malam akhir Ramadhan dan hidupsetelah matahari terbenam
   c. Masuk Islam sebelum senja menjelang akhir Ramadhan dan menetap dalam Islam
   d. Mereka yang wafat setelah matahari tenggelam pada akhir Ramadhan

   Menurut para ulama, besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan sesuai tafsir hadits adalah 1 sya' atau sekitar apa yang bisa dibandingkan dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok (tepung gandum, kurma) atau biasanya dimakan di daerah terkait (mazhab Syafi'i dan Maliki).

   Zakat fitrah harus diberikan setelah akhir Ramadhan sebelum salat Idul Fitri, sedangkan bagi individu yang membayar zakat fitrah setelah melakukan salat Idul Fitri, apa yang dia berikan dikecualikan sebagai zakat fitrah namun shodaqoh biasa. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah itu

[46] Abdul Jalil, *Mengenal zakat fitrah dan zakat mal*, (Semarang: mutiara aksara, 2019), hal. 52
[47] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hal. 21

sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Oleh karenanya , barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sesudah salat idul fitri, maka dia termasuk salah satu shodaqoh biasa". (hadits Abu Dawud dan Ibnu Majah).[48]

Menurut Yusuf Qardhawi ada 2 hikmah zakat fitrah yakni 1). Mensucikan kotoran selama berpuasa, karena selama berpuasa orang sering terjerumus pada ucapan dan perilaku yang tidak bermanfaat, serta melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. 2). Menumbuhkan rasa cinta untuk orang miskin dan orang yang membutuhkan. Pemberian zakat fitrah kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan akan mengantarkan mereka kepada kebutuhan dan kebahagiaan di hari raya.[49]

2) Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh setiap orang atau badan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan secara hukum atau syara.[50] Harta yang diserahkan dalam bentuk zakat harus memenuhi ketentuan berikut:
   a. Kepemilikan penuh atas barang yang diserahkan yakni harta yang akan dikeluarkan merupakan kepemilikan tunggal dari orang yang akan mengeluarkan zakat
   b. Berkembang yakni harta tersebut berpotensi untuk berkembang bila diusahakan
   c. Mencapai nisab berarti harta tersebut harus sudah mencapai ukuran atau jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga apabila harta tersebut belum mencapai nisab maka tidak wajib di zakat kan dan dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah.
   d. Lebih dari kebutuhan pokok, pemberi zakat harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan minimal atau kebutuhan pokok untuk hidupnya
   e. Bebas dari hutang, bila Individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak

[48] Ibid., hal. 22
[49] Ibid., 23
[50] Abdul Jalil, *Mengenal zakat fitrah dan zakat mal*, (Semarang: mutiara aksara, 2019), hal. 24

terpenuhinya nishab dan akan dibayar pada waktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat

f. Berlaku 1 tahun atau al-haul, kepemilikan harta tersebut telah mencapai 1 tahun khusus untuk ternak Roma harta simpanan dan Harta perniagaan.hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz atau barang temuan tidak memiliki syarat 1 tahun.[51]

Secara umum dalam syariat islam, kekayaan yang diperlukan untuk membayar zakat atau dikeluarkan zakatnya diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1) Emas, perak dan uang (tabungan)
2) Barang dagangan atau Harta perniagaan
3) Hasil ternak
4) Hasil pertanian
5) Hasil tambang dan barang temuan
6) Lain-lain (zakat profesi, saham, rezeki tidak terduga, undian atau kuis berhadiah).

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat adalah mereka yang berhak menerima harta zakat atau mustahik dapat dibagi menjadi 8 golongan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat at-taubah ayat 60:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-taubah: 60).

a. Fakir dan Miskin

Fakir atau al-fukara adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap untuk menghidupi dirinya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya)

[51] Abdul Jalil, *Mengenal zakat fitrah dan zakat mal*, (Semarang: mutiara aksara, 2019), hal. 25

tidak ada. Sedangkan "miskin adalah mereka yang tidak dapat mencukupi hidupnya, walaupun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya tidak mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada" .[52]

Fakir miskin dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu sebagai berikut:

1) Fakir miskin yang bekerja keras mencari nafkah yang hasilnya dapat menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, seperti pedagang, petani, tukang, buruh pabrik dan lain-lain, tetapi model dan sarana serta prasarana masih kurang. Jika hasilnya tidak memenuhi kebutuhan mereka harus dibantu dengan modal usaha untuk dapat mencari nafkah yang hasilnya dapat memenuhi kebutuhan hidup yang baik selamanya.
2) Mereka yang miskin jasmani dan rohani yang tidak mampu bekerja untuk mencari nafkah, seperti orang sakit, buta, tua, janda, anak-anak terlantar, dan lain-lain. Mereka berhak menerima zakat sampai mereka merasa cukup, hal ini juga dapat dilakukan dengan memberikan bantuan modal yang dikelola oleh orang lain (syirkah mudharabah) dan hasilnya memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak untuk selamanya.

b. Amil zakat atau pengumpul zakat (al-amilin alaiha)

Amil zakat atau pengumpul zakat (al-amilin alaiha) adalah orang atau panitia atau organisasi yang ditunjuk oleh penguasa yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat baik menghimpun, menyalurkannya kepada para mustahiq, dan secara profesional mengelola zakat.[53]

c. Muallafatu qulubihim atau orang-orang yang dibujuk hatinya

Adalah "orang-orang yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinan nya dapat makin bertambah keislamannya atau orang yang baru memeluk agama Islam, tetapi secara mental dan fisik teraniaya karena perlakuan keluarganya atau terhalang oleh niat jahat mereka atau kaum

[52] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hal. 37
[53] Ibid., hal. 38

muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh."[54] Dengan memperoleh bagian dari zakat akan dapat menguatkan hatinya di dalam Islam. Sementara itu, orang-orang kafir tidak boleh dibujuk hati mereka dengan zakat.

Menurut Imam Malik Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mualaf atau orang yang dapat diyakinkan hatinya dengan zakat ialah, 1) orangyang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diberikan zakat sebagai bantuan untuk meningkatkan keimanannya, 2) penguasa yang telah masuk Islam dan diharapkan akan mempengaruhi rakyatnya yang masih kafir untuk masuk Islam, 3) penguasa yang telah kuat imannya diharapkan dapat mencegah perbuatan zalim orang-orang kafir yang ada di bawah pimpinannya atau perbuatan orang-orang yang tidak mau memelihara zakatnya, 4) orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat.[55]

d. Fi riqob atau memerdekakan budak

Fi riqob atau memerdekakan budak menurut istilah syara, riqob adalah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan raqaba atau riqob, karena dia sepenuhnya dikuasai oleh tuannya, maka dengan menerima bagian zakat tujuannya adalah untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.

e. Al-gharimin atau orang-orang yang berhutang

Al-gharimin (orang-orang yang berhutang) adalah orang yang mempunyai hutang karena kegiatannya untuk kepentingan umum, seperti menengahi perselisihan antar keluarga, menjaga persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan mereka yang terlilit utang karena kerusakan moral dan mentalnya seperti orang utang karena narkoba, miras judi dan sebagainya mereka tidak berhak atas bagian dari zakat.

Adapun syarat-syarat utang yang menjadi bagian gharimin adalah: a) bagi mereka yang berhutang karena kemiskinannya atau kebutuhan yang sangat mendesak sedangkan ia tidak sanggup atau sulit membayar utangnya, maka orang tersebut mendapat bagian harta zakat sejumlah utang yang dideritanya atau sebesar utang yang sudah jatuh tempo. b) bagi

[54] Ibid., hal. 39
[55] Ibid., hal. 39

orang yang terlilit utang walaupun utangnya pada rentenir atau riba tetapi mempunyai kesanggupan untuk melunasinya, maka harta zakat boleh diberikan kepada orang yang bersangkutan yang digunakan untuk melepaskan diri dari riba dalam bentuk pinjaman kemudian ia berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya itu kepada amil zakat sesuai dengan kesepakatan tertentu.[56]

f. Fisabilillah atau di jalan Allah

Ialah segala jalan yang akan membawa umat kepada keridhoan Allah, semua tindakan yang alloh izinkan untuk memuliakan agamanya dan juga untuk menegakkan hukum-hukumnya. Menurut Prof Dr Mahmud syaltut, pengertian Sabilillah meliputi segala upaya memajukan agama, pembangunan negara dan yang terpenting adalah sebagai berikut:

1) Memperlengkapi berbagai senjata besar dan kecil serta berbagai jenis senjata modern untuk melindungi umat Islam dan menjaga kehormatannya dari segala gangguan. dari luar dan dalam.
2) Pembangunan rumah sakit militer dan rumah sakit umum, pembangunan jalan, instalasi yang diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi antar kota dan telekomunikasi antar daerah.
3) Membina kader-kader mobile Islam, untuk menunjukkan keindahan Islam dan kelemahannya, menyampaikan ajaran-ajarannya, dan menolak segala serangan musuh musuhnya
4) Segala upaya untuk melestarikan, mempelajari, dan memelihara Alquran, dan menjaga kesucian nya sampai hari kiamat

g. Ibnu Sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan

Adalah seseorang yang tidak memiliki bekal dalam perjalanan atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting atau darurat sementara ia tidak memiliki bekal.

Yang termasuk dalam Ibnu Sabil adalah: 1) mereka yang kekurangan bekal dalam perjalanan baik karena salah perhitungan, tersesat, hilang, dicuri, dirampok, dan lain-lain sedangkan ia sendiri tidak mendapatkan suatu cara untuk mendapatkan bekal yang ia perlukan 2) musafir yang ingin bepergian demi kemaslahatan Islam dan umatnya, 3) orang yang

[56] Ibid., hal. 41

memiliki harta namun tidak mampu mendapatkannya. Hal ini bisa terjadi, misalnya hartanya dipinjam orang lain dan belum dikembalikan karena disimpan pada bank yang bermasalah atau karena sebab-sebab lain, 4) tunawisma dan anak buangan.

Selain mustahik 8 asnaf tersebut, menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat dapat diberikan kepada orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, yaitu anak yatim dan orang jompo, penyandang cacat, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

5. Manfaat Zakat

Manfaat zakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu manfaat diniyah, khuluqiyah dan ijtima'iyah..

1) Manfaat diniyah (segi agama)
   a. Sebagai muslim tentu mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, terutama yang termasuk dalam rukun Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, karena itulah dengan mengeluarkan zakat berarti telah memantapkan diri sebagai muslim yang taat kpada perintah Allah SWT. Sebagai salah satu amal ibadah, sudah pasti akan mengantarkan hambanya kepada kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat.
   b. Selain untuk menguatkan diri sebagai seorang muslim, zakat juga merupakan salah satu cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, pencipta seluruh makhluk, meningkatkan kualitas keimanan seorang muslim karena di dalam zakat juga mengandung unsur ketaatan.
   c. Dengan mengeluarkan zakat, seorang muslim akan mendapat pahala yang sangat besar baik berupa pahala yang nanti akan di petik di akhirat, maupun balasan di dunia berupa penggantian harta yang lebih berlipat ganda dari Allah SWT
   d. Selain mendapatkan pahala, dengan mengeluarkan zakat juga akan menghapus dosa seorang muslim.
2) Manfaat khuluqiyah (akhlak)

Sebagai makhluk sosial tentu sesama manusia perlu memiliki rasa kepedulian, toleransi terhadap sesama dan selalu berlapang dada. Oleh karena itu, melalui zakat maka akan tumbuh sifat gotong royong dan toleransi, yang pada akhirnya seorang muslim yang terbiasa membayar zakat akan selalu berlapang dada. Bersikap saling asah, saling asuh, dan saling menyayangi kepada sesamanya.

Banyak bukti yang ditunjukkan oleh Allah, bahwa bagi orang yang terbiasa membayar zakat maka orang tersebut akan selalu dicintai, dihormati, dan mendapat derajat yang berbeda. Bagi mereka yang enggan membayar zakat, maka dadanya akan sempit dan sudah pasti tidak akan disukai oleh orang lain. Karena itulah, dengan menyegerakan membayar zakat, maka akan menghapus sikap kikir.

3) Manfaat Ijtima'iyah (sosial kemasyarakatan)

Sebagaimana kita ketahui bahwa kaum miskin masih merupakan mayoritas di negeri kita tercinta Ini. Padahal mereka membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itulah, bagi mereka yang mampu wajib membantu saudara muslimnya, sehingga tingkat kesejahteraan dapat teratasi dengan baik. Apabila zakat ini dibiasakan dan didistribusikan secara merata tanpa ada penyimpangan, pasti akan meredam gejolak sosial, kecemburuan sosial, kelemahan dan iri hati. Bahkan dapat mencegah tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat seiring dengan merosotnya perekonomian.[57]

Jika saja orang kaya memenuhi kewajibannya, yakni memanfaatkan harta kekayaan untuk membayarkan zakat dan membaginya dengan saudaranya, maka akan terjalin kerukunan dan rasa saling asah dan asuh akan terjalin. Apabila zakat dilakukan dengan benar, maka akan merangsang pertumbuhan ekonomi para pelakunya dan keberkahan akan bersamanya.

6. Hikmah Zakat

Zakat memiliki banyak hikmah yang terkandung didalamnya baik itu yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, diantaranya sebagai berikut:

[57] Ibid., hal. 13

a. Menolong, membantu, Membina dan membangkitkan semangat kaum duafa yang lemah dari segi materi. Dengan mendapatkan bantuan dari harta zakat, maka mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
b. Menekan sifat iri hati, rasa benci, dan dengki orang-orang yang hidup di sekitar mereka yang berkecukupan, terlebih lagi mereka yang hidup dalam kemewahan.
c. Mewujudkan keseimbangan penyaluran harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
d. Mampu mewujudkan sistem tatanan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip: ummatan wahidan atau umat yang satu, musawah atau persamaan derajat, dan kewajiban, ukhuwah islamiyah atau persaudaraan Islam dan Takaful Ijtima atau tanggung jawab bersama
e. Mensucikan diri atau pribadi dari dosa membersihkan jiwa yang kotor atau menumbuhkan akhlak mulia, murah hati terhadap sesama dan mengikis sifat bakhil atau kikir dan serakah

Zakat merupakan ibadah maliyah atau harta benda yang memiliki fungsi sosial ekonomi dan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, persaudaraan sesama muslim, pengikat persatuan umat dan bangsa agama serta pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin.

Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, yakni terjalinnya hubungan yang harmonis antara seseorang dengan lainnya, sehingga terwujudlah kerukunan dan kedamaian. Akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram aman lahir dan batin. Sehingga tidak lagi muncul kekhawatiran akan tumbuhnya kriminalitas, ajaran-ajaran sesat dan menyesatkan.[58]

B. Gambaran Umum Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak apabila diartikan dalam istilah asing adalah "*tax* (Inggris); *import contribution*, *taxe*, *droit* (Prancis); *steuer*, *abgabe*, *gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution*, *tributo*, *gravamen*, *tasa* (Spanyol), dan *belasting* (Belanda) dan menurut literatur Amerika, pajak selain disebut sebagai istilah *tax* juga dikenal

[58] Ibid., hal. 15

dengan istilah *tariff*."[59] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak memiliki arti pungutan wajib, pada umumnya berbentuk uang yang menjadi kewajiban penduduk untuk dibayarkan sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan, harga beli barang, pemilikan, dan sebgainya. Sedangkan menurut kamus pajak, "pajak artinya kontribusi wajib pajak yang diberikan kepada negara yang terutang berasal dari masing-masing pribadi orang maupun badan yang sifatnya memaksa, dengan berlandaskan undang-undang dan imbalan tidak didapatkan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan kemakmuran rakyat."[60]

Dibawah ini, arti dari pajak menurut para ahli:

7. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. *"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"*.[61]
8. Santoso Brotodihardjo mengemukakan pendapat tentang pajak dari pendapat Edwin R.A. Seligman dalam Esseys in Taxation, New York (1925), bahwa *"pajak ialah kontribusi wajib dari orang kepada pemerintah untuk membiayai biaya yang pengeluarannya untuk kepeningan umum, tanpa referensi untuk diberi manfaat khusus"*.[62]
9. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets, *"pajak ialah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi untuk membiayai pengeluaran pemerintah."*
10. Disusul dengan pendapat yang dikemukakan oleh Anderson Herschel, bahwa *"Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah seta tidak merupakan akibat dari pelanggaran yang diperbuat, tetapi merupakan suatu kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku, tanpa adanya imbalan dan dilakukan guna mempermudah pemerintah dalam menjalankan tugasnya"*.[63]
11. Prof. Dr. P.J.A. Andriani mengartikan bahwa *"pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya*

---

[59] Kusnanto, *Belajar Pajak*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hal. 12-13
[60] Adnan Abdullah, *Kamus Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hal. 162
[61] Ibid., hal. 3
[62] Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 23
[63] Chatrina Vista Okta Frida, *Hukum Pajak Di Indonesia Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2020), hal. 8

menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanna adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".[64] Dari definisi tersebut, pajak hanya difokuskan pada fungsi budgeter yakni digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sedangkan pajak masih memiliki fungsi lain yakni fungsi mengatur.

12. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi *"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.[65] Maksudnya, bagi wajib pajak/ orang pribadi maupun badan memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi yang bersifat memaksa kepada sebuah negara, yang imbalannya tidak diberikan secara langsung, namun digunakan untuk kepentingan negara guna memakmurkan rakyatnya.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Prestasi/Iuran dari rakyat yang diberikan kepada negara.
2. Dalam hal pemungutan pajak, negara lah yang memiliki hak untuk memungutnya.
3. Berdasarkan dari Undang-Undang. Pajak yang diambil berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
5. Digunakan untk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat luas.[66]

---

[64] Lazarus Ramandey, *Perpajakan, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 1
[65] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), hal.3
[66] Ibid., hal.3

Jadi pengertian pajak menurut penulis yakni pajak merupakan iuran rakyat yang diberikan kepada kas negara, yang berdasarkan undang-undang bersifat dapat dipaksakan serta tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung dapat diberikan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang berguna bagi masyarakat luas. Dari pengertian tersebut, pajak hanya memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaan-pengeluaran umum, namun sebenarnya pajak memiliki fungsi lain, yakni sebagai berikut:

a. Fungsi anggaran atau budgetair, artinya pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
b. Fungsi mengatur atau regulerend, maksudnya adalah pajak memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.[67] Contohnya: menetapkan pajak yang tinggi pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

Adapun ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:[68]

a. Harta kekayaan rakyat (sektor swasta)
b. Berdasarkan undang-undang
c. Bersifat memaksa
d. Sebagian
e. Wajib diberikan kepada negara (sektor publik)
f. Tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung
g. Bukan merupakan penalti
h. Yang mempunyai fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend)

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan perlawanan atau hambatan, maka diperlukan adanya syarat dalam memungut pajak yakni sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

---

[67] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2018, (Yogyakarta: Andi Offset, 2018), hal. 4
[68] Muda Markus, *Perpajakan Indonesia, Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2005), hal. 1-2

Pajak di Indonesia dapat dibedakan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut:[69]

1) Menurut golongannya
   a. Pajak langsung,yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan
   b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.contoh:pajak pertambahan nilai
2) Menurut sifatnya
   a. Pajak subjektif,yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya,dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.contoh:pajak penghasilan
   b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objek nya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh:pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
3) Menurut lembaga pemungutannya
   a. Pajak pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. contoh:pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai
   b. Pajak daerah yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.pajak daerah terdiri atas pajak provinsi, (contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor) dan pajak kabupaten atau kota (contoh: pajak hotel pajak restoran dan pajak hiburan)

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum hukum sebagai berikut:[70]

a. Hukum perdata,mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.

---

[69] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), hal. 7-8
[70] Ibid., hal. 6

b. Hukum publik,mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.hukum ini dapat dirinci lagi dalam hukum tata negara, hukum tata usaha (hukum administratif), hukum pajak dan hukum pidana

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada dua macam hukum pajak, yaitu:

1) Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), Siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), Berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.
2) Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat, antara lain:
   a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
   b. Hak hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan,perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak
   c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan Dan banding

Dalam pemungutannya, pajak memiliki tata cara yang dapat dilakukan, yakni sebagai berikut:[71]

1) Stelsel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel:
   a. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

      Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.sedangkan

[71] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016), hal. 8-9

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan riil diketahui.

b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya,sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan,maka wajib pajak harus menambah.sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas pemungutan pajak

a. Asas domisili atau asas tempat tinggal, negara berhak mengenakan pajak atasseluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak

c. Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

3) Sistem pemungutan pajak

a. Official assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2) Wajib pajak bersifat pasif
3) Uang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. Self assessment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. Withholding system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.Adalah kerangka kerja bermacam-macam tugas yang mengizinkan orang luar (bukan spesialis penilaian dan bukan warga negara terkait) untuk menyimpan atau mengumpulkan pajak yang harus dibayar oleh warga negara. Kualitas: kekuatan untuk menyimpan atau mengumpulkan biaya yang terutang terletak pada orang luar, untuk menjadi pertemuan khusus selain spesialis tugas dan warga negara.

Pajak dalam Islam, secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama dhoribah yakni asal dari kata "ضرب يضرب ضربا" maknanya "mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan dan lain-lain."[72] Pada Alquran kata dhoroba terdapat dalam Qur'an surat al-baqarah ayat 61:

[72] Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 28

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّاۤىِٕهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَ بَصَلِهَاۗ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌۗ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاۤءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

“Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: Hai Musa, Kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk Kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi Kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata: Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.”(Q.S Al-baqarah ayat: 61)

Dalam bahasa dan adat, dharibah dalam pemanfaatannya memiliki banyak implikasi, namun banyak ulama dominan menggunakan artikulasi konsep yang mengacu pada harta yang dikumpulkan sebagai kewajiban.[73] Ini jelas dalam artikulasi bahwa jizyah dan kharaj dikumpulkan atas dasar dharibah, yaitu wajib. Memang, bahkan beberapa peneliti mengatakan kharaj berasal dari dharibah. Dengan demikian, dharibah adalah harta yang wajib dikumpulkan oleh negara selain jizyah dan kharaj meskipun keduanya dapat digolongkan dari dharibah. Perbedaan dari jizyah, dharibah, dan kharaj terletak pada sasarannya, lebih spesifiknya sasaran kewajiban (dharibah) adalah harta (maal) umat Islam, sasaran jizyah adalah an-nafs (ruh) non- Muslim, sedangkan sasaran kharaj adalah tanah(status tanah).

Jadi, arti dari pajak atau dharibah merupakan beban tambahan yang ditanggung umat Islam untuk keuntungan mereka sendiri, khususnya umat Islam, yang tidak dipuaskan oleh negara dari sumber-sumber primer, misalnya ghonimah, shodaqoh.(zakat dan ushr pertanian), fay’i (jizyah, kharaj, ushr perdagangan), dan sumber pendapat dan sekunder lainnya.

[73] Ibid., hal. 28

Ada tiga tokoh ulama yang mendefinisikan terkait dengan pajak, yakni:[74]

a. Yusuf qardhawi berpendapat bahwa *"pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara"*.
b. Gazy Inayah berpendapat bahwa *"pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah."*
c. Abdul Qadir zallum berpendapat bahwa *"pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang atau harta."*

Dari definisi yang telah disebutkan, pendapat dari qardhawi dan inayah masih terkesan sekuler sementara pemikiran yang dinyatakan oleh Zallum telah memenuhi 5 komponen prinsip yang merupakan komponen penting yang harus terkandung dalamketentuan pajak sesuai Syariah, yakni:

1) Allah SWT yang mewajibkanyya
2) Obyeknya yakni Al-maal atau harta
3) Subyeknya adalah orang kaya muslim (ghaniyyun) dan bukan non muslim
4) Hajatnya ialah untuk mendanai keperluan mereka atau umat islam sebagaimana adanya
5) Berlaku hanya karena krisis atau kondisi darurat yang harus segera ditangani oleh Ulil Amri

[74] Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 31

Dasar hukum yang mewajibkan adanya pembayaran pajak (dharibah), terdapat pada Q.S Al-Baqarah: 177, yang berbunyi:[75]

لَيْسَ الْبِرَّاَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

Ayat di atas menerangkan bahwa terdapat keharusan pada harta selain zakat, lebih tepatnya pajak untuk menutupi biaya atau pemberian harta yang dicintainya kepada anggota keluarga, anak yatim, orang miskin, musafir, dll sebagai pokok dan komponen kebaikan. Yang dimaksud dengan pajak adalah membangun sikap saling membantu sesama umat Islam sehingga limpahan harta itu mengalir, tidak hanya mengalir di kalangan orang kaya saja. Demikian pula, pajak juga memiliki fungsi yang tidak kalah pentingnya dengan zakat, dimana pajak merupakan cara untuk mendukung berbagai kebutuhan negara yang belum dapat dipenuhi oleh zakat.

Selain itu, terdapat beberapa pendapat ulama tentang adanya kewajiban lain atas harta selain zakat salah satunya ialah pendapat dari Mahmud syaltut dalam al-fatawa yang berkata: “Apabila pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat dana untuk menunjang kemaslahatan umum seperti pembangunan sarana pendidikan, Balai Pengobatan, perbaikan jalan dan

[75] Depi Rianita Sari, Skripsi: *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah),* Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010, hal. 31

saluran air, serta mendirikan industri alat pertahanan negara, sedang kaum hartawan masih diam membelenggu tangannya, maka bolehlah dan Adakalanya wajib bagi pemerintah untuk memungut pajak dari kaum hartawan untuk meringankan pelaksanaan rencana pembangunan itu".[76] Pendapat ini menyimpulkan bahwa, adanya kewajiban bagi pemerintah untuk memungut pajak dari para hartawan untuk menunjang kemaslahatan umum.

C. Gambaran Umum Kebijakan Fiskal

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Fiscus adalah bahasa latin dari kata fiskal yang artinya seorang yangcmana mempunyai kuasa atas keuangan pada zaman romawi kuno. Kata fiskal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sesuatu yang berkaitan dengan urusan pajak atau penerimaan negara.[77] Selain itu, fiskal dalam kamus pajak memiliki arti pendapatan negara yang dikumpulkan dari rakyat, lalu digunakan untuk membiayai keperluan negara dan perekonomian nasional.[78]

Sedangkan pengertian kebijakan fiskal menurut beberapa ahli, adalah sebagai berikut:

1. Menurut Mannan, *"kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuata perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara".*
2. Menurut Wolfson, *"kebijakan fiskal (fiscal policy) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penetuan harga barang dan jasa dari perusahaan."*
3. Menurut samuelson dan Nordhaus, *"kebijakan fiskal adalah proses pembentukan dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis, dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, pengunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah".*

---

[76] Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 154

[77] Mohamad Alfin Bawazir, Skripsi: *Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2021), hal. 15

[78] Adnan Abdullah, *Kamus Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hal. 73

4. Menurut Gus Fahmi, kebijakan fiskal merupakan *"kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang keuangan, meliputi penerimaan negara, pengeluaran negara dan utang negara".*[79]
5. Menurut I Wayan Sudirman, *"kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki pada umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan".*[80]

Berdasarkan beberapa paparan makna kebijkan fiskal di atas bisa ditarik benang merah yaitu kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan aparatur negara terkait dengan penerimaan dan pembelanjaan negara guna mempengaruhi jalannya perekonomian.

2. Jenis Kebijakan Fiskal

Berdasarkan jenisnya, kebijakan fiskal dibagi menjadi 2 macam kebijakan, yakni sebagai berikut:

a. Kebijakan fiskal deskresioner, merupakan kebijakan fiskal yang mana diperoleh pemerintah berdasar akansuatu kondisi dimana ekonomi yang menjadi faktornya. Pemerintah selanjutnya melaksanakan kebijakan belanja surplus apabila mendapati perekonomian sedang berada pada kondisi pengangguran meningkat, sukubunga meningkat serta inflasi juga meningkat, maka dari itu pemerintah akan melaksanakan kebijakan belanja defisit jika memandang bahwasanya pengangguran dalam kondisi yang wajar, suku bunga terlalu rendah, dan tingkat harga terlalu lambat berubah.
b. Kebijakan fiskal menggunakan penyeimbang otomatis, yaitu kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan pajak, asuransi, pengangguran, dan kebijakan harga minim.[81]

3. Instrumen Kebijakan Fiskal

---

[79] Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Depok: Rajawali, 2017), hal. 123

[80] I Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori dan Empirikal*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal.2

[81] Iskandar Putong, Economics, pengantar Mikro dan Makro, edisi 5, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal.315

Instrumen kebijakan fiskal yang utama adalah kebijakan perpajakan (tax policy) dan kebijakan pengeluaran (ekspenditure policy).[82] Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat, dan industri akan dapat meningkatkan jumlahoutput. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.[83]

4. Fungsi Kebijakan Fiskal

a. Fungsi Alokasi Ekonomi, yakni fungsi yang bertujuan untuk menyalurkan faktor-faktor produksi yang dapat diakses secara lokal, sehingga kebutuhan daerah setempat seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat untuk beribadah dapat terpenuhi dengan baik dan dapat dinikmati oleh seluruh daerah setempat.
b. Fungsi Distribusi Ekonomi, yakni faktor yang dimaksudkan untuk membagi pendapatan publik agar lebih merata untuk semua lapisan dan tingkat kehidupan.
c. Fungsi Stabilisasi Ekonomi, yakni fungsi yang bermaksud untuk menjaga keseimbangan ekonomi, yang terpenting yakni lowongan pekerjaan yang tinggi, biaya umum yang cukup stabil dan tingkat perkembangan moneter yang memuaskan.[84]

5. Tujuan Kebijakan Fiskal

a. Menanggulangi pengangguran dan lowongan pekerjaan yang meningkat. Karena kebijakan moneter bukanlah yang akan berprospek baik dan efektif dalam memecahkan masalah ekonomi, terutama dalam mengatasi pengangguran, untuk itu perlu dilaksanakan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dipastikan pemerintah pada bentuk kebijakan di bidang penganggaran dan belanja negara. Berdasarkan pada kebijakan belanja negara, pemerintah bisa menetapkan program pembangunan guna memberantas pengangguran terbuka dengan cara menciptakan lapangan kerja yangmana bersifat padat

---

[82] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hal. 1
[83] Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: Deepublish, Februari 2016, hal. 152
[84] Iskandar Putong, Economics, pengantar Mikro dan Makro, edisi 5, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal.315

karya. Pendanaan dapat bersumber dari menaikkan tax, membatasi untuk mencetak uang tunai,serta memanfaatkan sisa dana hasil pembangunan atau penggunaan aset nonmoneter dari usaha milik negara, dll.

b. Guna menyeimbangkan harga, Sistem pasar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan pelaku bisnis untuk tetap bekerja (dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya), sehingga kecenderungannya sangat besar untuk memanfaatkan momentum hukum dan teori permintaan dan penawaran. Sesuai dengan kaidahnya, bila harga suatu produk rendah maka jumlah penawarannya akan rendah pula, untuk keadaan ini pembeli yang dirugikan karena akan terjadi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan.
c. Guna menentukan laju investasi. Kebijakan ini tak lain mempunyai tujuan guna memacu laju investasi swasta dan negara yaitu dengan cara mengendalikan konsumsi baik yang nyata ataupun potensial atau menerapkan investasi terencana di sektor publik. Investasi di sektor publik akan mendorong dan meningkat volume investasi komersial dari pihak swasta maupun pemerintah. Misalkan pemerintah membangun jalan Trans Antar Provinsi maka diharapkan sektor swasta tertarik untuk mengembangkan potensi daerah yang dilalui jalan Trans tersebut.di satu sisi pemerintah harus menghambat investasi di bidang produksi konsumtif,sedikit nilai tambahnya dan hanya untuk kalangan tertentu saja,misalkan investasi lapangan golf,apartemen dan sejenisnya.
d. Guna memberikan infus investasi sosial yang optimal. Kebijakan ini memotivasi pemerintah untuk berinvestasi ke bidang yang diinginkan oleh masyarakat seperti investasi di bidang transportasi,Perhubungan,konservasi lahan dan investasi overhead ekonomi lainnya.diharapkan investasi ini akan memberikan eksternalitas positif,memperluas pasar,meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi.
e. Guna mencegah inflasi. Adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sumber, akan menyebabkan adanya gap inflasi. Bertambahnya permintaan sementara penawaran tetap akan menyebabkan naiknya harga-harga yang akan mendorong inflasi secara umum.Untuk itu maka pemerintah dapat melakukan kebijakan pajak progresif, mengendalikan ekspansi kredit,menyerap daya beli tambahan dan merangsang tabungan sukarela.

f. Peningkatan penstabilan ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional.
g. Guna menaikkan pendistribusian penerimaan publik. Motivasi di balik pengaturan ini adalah untuk menghilangkan disparitas yang keterlaluan antara individu dengan gaji rendah dan mereka yang memiliki gaji dalam jumlah besar. Bahkan alokasi gaji akan meningkatkan daya beli yang juga umumnya merata sehingga setiap strategi administrasi yang harus dijalankan dapat dijalankan dengan tepat.[85]

Menurut penerapannya, terdapat empat kategori dalam kebijakan fiskal yakni:

a. Pendanaan berdasarkan fungsi. Terdapat hal yang paling utama dari tipe kebijakan ini yakni:
    1. Pajak digunakan untuk mengontrol perincian pengeluaran swasta, tidak pendapatan pemerintah. Jadi dengan asumsi bahwa masih ada pengangguran dalam perekonomian maka, pada saat itu, biaya tidak diperlukan.
    2. Dalam kasus inflasi yang berlebihan, otoritas publik akan memberikan utang luar negeri untuk membiayai penarikan dana yang disediakan untuk umum
    3. Jika pajak dan utang dianggap tidak tepat, otoritas publik akan membuat kemajuan dalam negeri melalui pencetakan uang tunai
b. Pengelolaan anggaran, menurut kebijakan ini yang terpenting adalah:
    1. Ada hubungan langsung antara pengeluaran publik dan pendapatan pajak dengan menyesuaikan rencana keuangan untuk membatasi kerawanan moneter
    2. Selama periode depresi, dimana ada banyaknya pengangguran, pengeluaran pemerintah adalah cara paling efektif untuk mengelolanya
c. Stabilisasi anggaran otomatis. Dalam pengaturan ini yang diterapkan adalah:
    1. Selama kesempatan kerja penuh atau full employment pajak akan diusahakan surplus
    2. Jika dalam perekonomian terjadi kemerosotan moneter, program pajak tidak akan diubah, namun sebagai hasilnya, pendapatan dari pajak akan berkurang dan pengeluaran pemerintah akan meningkat

[85] Ibid., hal. 316-317

3. Ketika pengeluaran pemerintah meningkat selama keadaan krisis ekonomi, akan ada kekurangan anggaran, yang akan mendesak pihak swasta untuk maju
4. Ketika inflasi terjadi, peningkatan pendapatan pemerintah yang mulanya dari pajak anggaran belanja surplus sedangkan bantuan uang untuk pengangguran tidak boleh terlalu tinggi.

d. Anggaran belanja seimbang. Pada kebijakan tersebut, pemerintah telah mengambil tindakan sebagai berikut:
   1. Penerapan anggaran belanja defisit pada krisis ekonomi (depresi)
   2. Pada periode inflasi menerapkan anggaran surplus. Akan tetapi, anggaran belanja diusahakan seimbang dalam jangka panjang .[86]

[86] Ibid, hal 318

BAB III
PEMIKIRAN MASDAR FARID MASUDI TENTANG ZAKAT DAN PAJAK

A. Biografi Singkat Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi lahir di desa Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto pada tanggal 18 September 1954. Beliau lahir dari pasangan KH. Mas'udi bin Abdurrahman dan Hj. Hasanah.[87] Beliau pernah kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979) Jurusan Tafsir-Hadist. Kemudian melanjtkan S-2 program filsafat di UI (1996). Mas'udi juga pernah berguru (nyantri) kepada Kiai Ali Maksoem Krapyak Yogyakarta (1968-1974) dan kepada Kiai Khudlori di Pesantren Tegalrejo, Magelang (1966-1968).[88]

Awal perjalanan karir Masudi dimulai ketika beliau menjadi mahasiswa aktif di IAIN Sunan Kalijaga. Beliau terpilih menjadi ketua pergerakan mahasiswa islam indonesia (PMII) Komisariat Krapyak Yogyakarta pada tahun 1973-1975. Kemudian, sekitar tahun 1983 beliau terpilih sebgai ketua 1 PB-PMII (Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Beliau pindah ke Jakarta setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1980 dan bekerja untuk lembaga Misi Islam NU dan menjadi wartawan diberbagai media massa ibu kota. Saat ini Masdar Mas'udi menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus menjabat sebagai direktur P3M jakarta, Anggota dewan Etik ICW (Indonesia Corruption Watch), serta Komisi Ombudsman Republik Indonesia.[89]

B. Konsep Pajak dan Zakat Menurut Masdar Farid Mas'udi

Masdar dikenal sebagai pelopor visi pembebasan islam (Taharruri), dimana ajaran islam dipahami dari sudut pandang kemanusiaan. Baginya, pemahaman islam yang benar tidak cukup hanya dilihat dari kesesuaian formalnya dengan bunyi teks, tetapi juga dari efektivitasnya dalam mencapai kebaikan martabat manusia.[90] Bertolak dari perspektif inilah, masdar menulis buku "Pajak itu Zakat" dengan bertolak belakang keadilan sosial, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung, merupakan tugas

---

[87] Imdadun Rahmat, dkk, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 234.

[88] Taufikur Rahman, *Rethinking Ajaran Zakat*, Jurnal Muqtashid, Vol. 2 No. 1, Juli 2011, hal. 156

[89] Liliyani, skripsi: *Kewajiban Penyatuan pajak dan Zakat dalam pandangan Didin Hafidudin dan Masdar farid Masudi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018, hal. 22

[90] Masdar Farid Masudi, *Pajak itu Zakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010, hal. vi

negara yang harus diungkapkan dan diukur secara jelas dalam kebijakannya yang paling strategis, yakni kebijakan anggaran.

Dalam kurun waktu yang cukup lama 13 abad bahkan lebih, secara umum dapat dikatakan bahwa , penalaran dan pelaksanaan zakat dalam lingkungan muslim secara terus-menerus telah digariskanoleh tiga kekurangan mendasar dan secara bersamaan menjadi karakter penting yang saling berkaitan. *Pertama*, kekurangan dari aspek filosofi. *Kedua*, aspek sistem dan kelembagaan. Dan *Ketiga*, lemah dalam hal administrasi operasional. Perpaduan ketiga faktor tersebut mengakibatkan zakat, yang pada hakikatnya termasuk gerakan sosial yang cakupannya dapat menyentuh realitas sosial struktural, berubah menjadi suatu tindakan kesadaran individu dari setiap individu yang dampaknya juga bersifat individual.[91]

Masdar Farid Mas'udi mengemukakan pemikirannya dalam bukunya yang berjudul Pajak itu Zakat, bahwa *"Agama dan negara itu dua perkara yang berbeda, namun tidak bisa dipisahkan. Agama sebagai visi tidak akan ada artinya tanpa negara sebagai wadah aktualisasinya. Begitupun sebaliknya, negara sebagai wadah kekuasaan tidak boleh terpisah dengan agama sebagai visi illahiah untuk keadilan bagi semua."*[92]Maksudnya, agama menjadi spirit, ruh illahiyyat yang memberikan arahan kepada negara yang sebagai badannya atau kelembagaan yang profan. Sehingga negara itu akan menciptakan sebuah keadilan yang merata, terutama bagi kaum yang lemah dan terpinggirkan.

Pemikiran ini diaplikasikan dengan adanya penyatuan zakat dan pajak, dimana zakat sebagai spirit atau roh yang merasuk pada pajak sebagai badannya. Roh dan badan tidak mungkin dipisahkan. Maksudnya apabila seseorang telah membayar zakat (pajak) kepada pemerintah, maka kewajibannya sudah di anggap gugur atau terpenuhi.[93] Dengan kata lain zakat sebagi teori sedangkan pajak sebagai prakteknya.[94]

Perpajakan dengan spirit zakat merupakan konsep yang pernah diterapkan oleh Nabi SAW dan beberapa khalifahnya di Madinah 14 abad yang lalu, yang sesuai dengan kondisi material dan sosial pada saat itu.[95] Namun, tak lama kemudian ruh zakat itu terpisah dari jasadnya, pajak menjadi sebuah upeti yang dipungut oleh

---

[91] Masdar Farid Masudi, *Pajak itu Zakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010, hal. 18-19

[92] Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, hal. 167

[93] Ibid., hal 136

[94] Gus fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 186

[95] Masdar Farid Masudi, *Pajak itu Zakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010, hal. 70

negara atau jizyah sampai saat ini. Akibatnya, uang pajak dan kekuasaan negara yang didanai oleh uang itupun berada di tangan elite penguasa dan kelompok orang kaya.[96]

Sebagaimana kita ketahui, dalam pemahaman zakat, ada dua faktor penting. *Pertama*, paham tentang pengumpulan dana publik (akhdzal-ahadaqah) oleh lembaga pemerintah dari rakyat yang mampu, yang biasa dikenal dengan sebutan pajak. *Kedua*, paham terkait dengan pembelanjaan (tasharruf) dana publik guna redistribusi kesejahteraan, terutama kepada mereka yang kurang mampu,serta dana untuk kepentingan umat (sabilillah).[97] Terkait paham yang pertama, pengumpulan dana publik (pajak), berikut ini al-Quran menerangkan tentang pungutan pajak:

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلوٰتك سكن لهم والله سميع عليم

Artinya: "Ambillah zakat (pajak) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".(Q.S At-Taubah: 103)

Zakat (pajak) sebagai milik alloh, yang dikumpulkan oleh pemerintah sudah seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan atas izin alloh, yaitu guna kepentingan semua orang, yang terpenting untuk fakir miskin.[98] Artinya, penggunaan pajak tidak hanya pertanggungjawaban kepada Alloh (spiritual & moral accountability), namun juga pertanggungjawaban kepada rakyat (public accountability).

Kemudian ajaran yang kedua tentang pembelanjaannya (alokasi biaya publik), ditegaskan dalam ayat sebagai berikut:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (At-Taubah: 60)

Mengarah pada ayat diatas, maka alokasi biaya pajak haruslah terdiri dari 3 tujuan utama:

a. Pemberdayaan rakyat yang lemah

---

[96]Masdar Farid Masudi, *Pajak itu Zakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010, hal. 70
[97] Ibid., hal. 158
[98] Ibid., hal. 90

b. Biaya rutin pemerintah
c. Kebutuhan publik (public goods atau sabilillah), baik bersifat fisik maupun non fisik

Menurut Masdar Masudi, pemaknaan penggunaan zakat (pajak) yang tercantum dalam Q.S At-taubah: 60 yakni diperuntukkan kepada 8 kelompok (sektor), lima di antaranya adalah untuk bagian populasi yang kurang beruntung. Khususnya: kelompok faqir, kelompok miskin, riqab (kaum teraniaya), gharimin (rakyat terbelit utang), dan ibn sabil (tunawisma dan pengungsi), atau bahkan juga muallaf qulubuhum (penghuni lembaga pemasyarakatan dan suku yang terisolasi). Hanya ada dua sektor yang jelas-jelas yangmenangani kemaslahatan publik, yakni sektor amilin (biaya operasional pemerintah) dan sabilillah (keamanan, ketertiban penegakan hukum, serta penyediaan sarana dan prasarana umum).[99] Jadi, jika dalam pembicaraan ini zakat dikenal sebagai kepentingan umat, maka yang tersirat adalah seluruh penduduk dengan kebutuhan dari lapisan masyarakat yang paling tidak mampu.

Lebih jelasnya 8 mustahik yang disebutkan, serta bagaimana penjabarannya pada zaman rasulullah saw dan sekarang adalah sebagai berikut:

a. Faqara-Masakin (Fakir Miskin)

Para ahli fiqih pada umumnya sering membedakan antara orang fakir dan orang miskin. Istilah fakir mengacu kepada seseorang yang dilihat dari sudut pandang ekonomi menempati posisi paling bawah. Sementara miskin mengacu kepada seseorang yang kondisi ekonominya lebih baik daripada orang fakir, namun secara umum mereka termasuk orang yang masih kesulitan terkait hal pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.[100]

Menurut pandangan masyarakat sekitar saat itu, fuqoha klasik biasanya hanya mengatur kebutuhan dasar pada tiga hal (pangan, sandang, dan papan) dalam perhitungan yang semata-mata bersifat kuantitatif. Katakanlah "*pangan asal wareg, sandang asal rapet,* dan *papan asal bisa untuk ngumpet"*.[101] Dalam konteks saat ini, konsep kebutuhan dasar tersebut jelas perlu disesuaikan, tidak hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kualitasnya. Oleh karena itu, kebutuhan dasar yang dapat diandalkan untuk kehidupan manusia secara alami itu meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan jaminan kesehatan.

---

[99] Ibid., hal 91-92
[100] Ibid., hal 113
[101] Ibid., 114

Maka dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini, pentasharrufan dana pajak-zakat kepada fakir miskin ini dapat meliputi:[102]

a) Mengembangkan sarana fisik dan infrastruktur pertanian sebagai pijakan kemakmuran rakyat dalam bidang ekonomi dalam arti seluas-luasnya
b) Mengembangkan bidang industri ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat pada umumnya
c) Menyelenggarakan sekolah keterampilan dan kejuruan untuk menanggulangi adanya pengangguran
d) Pembangunan perumahan bagi para tunawisma atau gelandangan
e) Asuransi jiwa bagi penyandang cacat, lanjut usia, yatim piatu, dan pengangguran
f) Penyediaan fasilitas pendidikan dari dasar hingga universitas dan prasarana pendidikan bagi seluruh warga negara/masyarakat yang membutuhkan
g) Penyediaan sarana dan layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga
h) Menyediakan infrstuktur lainnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kessejahteraan masyarakat kelas bawah.

b. Amilin (Aparat Pajak dan Pemerintah)

Pada dasarnya, Amil adalah mereka yang disebut “imam”, “khalifah”, atau setidaknya “amir” yaitu pemerintah yang efektif. Namun, dalam praktik sosiologis, kini telah beralih ke “tokoh agama” lokal (sering terjadi di komunitas muslim pedesaan tradisional), atau ke panitia yang telah ditunjuk oleh pemimpin organisasi keagamaan banyak terlihat di perkotaan).

Hal ini tentu saja perlu dipahami dalam bidang kehidupan yang semakin kompleks, yang menjadi tanggung jawab mereka. Pentasharuffan dalam kehidupan masyarakat saat ini:

a) Pegontrol kebijakan pajak berdasarkan persetujuan wajib pajak (muzakki)
b) Aparat administrasi perpajakan

[102] Ibid., hal. 115

c) Semua pejabat negara yang bertugas untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan dana pajak.

Semua orang ini berhak atas kompensasi pajak sebagai Amilin. Tentu saja, mereka sangat menyadari bahwa tugasnya adalah misi Allah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat.

c. Mu'allaf Qulubuhum (Rehabilitasi Sosial)

Makna harfiah muallaf qulubuhum berarti mereka yang sedang dijinakkan hatinya. Menurut Farid Masudi , pada dasarnya Rasulullah SAW menafsirkan "Muallaf adalah mereka yang harus disadarkan hatinya untuk kembali ke fitrah manusianya, yang selalu mengarah kepada kebaikan dan menolak kejahatan. Misalnya, sebagai anggota masyarakat, ia harus menghormati hakorang lain sama seperti orang lain harus menghormati hak-hak dirinya, bersedia hidup berdampingan secara damai dengan orang lain dan tidak merugikan orang lain, kalau bisa malah berbuat baik kepada orang lain, menghormati ketertiban sosial yang disepakati bersama dan lainnya".[103]

Dengan kata lain, jika muallafqulubuhum dipahami sebagai individu yang masuk ke dalam islam, maka islam yang dimaksud ialah keislaman dalam tingkahlaku sosialnya yang bisa dikendalikan oleh masyarakat dan juga negara. Bukan islamyang tersembunyi di dalam hati setiap orang yang tidak bisa disentuh oleh tindakan sosial atau tindakan kuasa negara.

Dalam pengertian ini, dana muallaf untuk konteks kemasyarakatan kita sekarang sasarannya adalah untuk:

a. Upaya mendidik mereka yang terjerumus kedalam praktek-praktek asusila, kejahatan dan kriminal
b. Biaya rehabilitasi jiwa bagi orang atau anak yang disebabkan oleh misalnya penyalahgunaan narkoba dan lain-lain
c. Mengembangkan masyarakat atau suku terasing
d. Upaya pemulihan kemanusiaan lainnya

d. Riqab (Yang Tertindas)

Menurut harfiah riqab artinya budak. Saat ini, orang yang berstatus budak sudah tidak pernah kita jumpai. Namun, apabila ditilik lebih dalam artinya,

[103] Ibid., hal. 119

jelas terlihat bahwa baik secara personal maupun struktural kelompok manusia sedang ditindas dan dimanfaatkan oleh orang lain. Pada akhirnya, berbeda dengan miskin, yang lebih mengacu pada individu yang menderita secara sosial-finansial, maka riqab mengacu pada individu atau kelompok yang menderita secara politik maupun budaya. Dalam konteks sekarang , dapat di tasharrufkan sebagai misalnya:

a. Memperbaiki nasib kaum buruh kalangan bawah dan pekerja kasar yang terbelenggu oleh majikan yang menjeratnya
b. Upaya untuk membebaskan individu tertentu yang dihukum atau ditahan hanya karena mereka mempraktikkan hak dasar mereka untuk memiliki penilaian atau suara

Sementara dalam bentuknya yang struktural dana riqob ini bisa berarti dana untuk proses penyadaran dan pembebasan orang-orang tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam Sedangkan, dalam bentuk struktural, biaya riqob dapat berarti biaya guna proses penyadaran dan kebebasan individu yang diperlakukan dengan buruk, untuk hak asasi mereka sebagai manusia, baik pada aspek pribadi maupun sosial.

e. Gharimin (Yang Terbelit Utang)

Makna harfiah gharimin adalah orang yang berhutang. Sampai saat ini, buku-buku fiqh mengartikannya sebatas arti perseorangan, yakni mereka yang usahanya bangkrut akibat suatu hal, padahal modalnya berasal dari kredit. Karenanya, mereka menerima uang zakat untuk melunasi hutang-hutang mereka. Untuk konteks masyarakat kita saat ini, definisi ini masih relevan, terutama jika menyangkut bisnis dengan hutang, semakin umum akhir-akhir ini dan hutang yang selalu terbebani oleh besarnya bunga.

Konsep pentasharuffan biaya zakat (pajak) guna melunasi hutang-hutang mereka yang bangkrut, juga memiliki alasan untuk dibelanjakan, misalnya dalam upaya meningkatkan kemampuan manajerial mereka, mereka berbisnis dengan utang. Dengan demikian, selain ditasarufkan untuk keperluan kuratif untuk melunasi utang-utang orang yang bangkrut, biaya zakat itu juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan pencegahan, yaitu pelatihan bagi para wirausaha kecil agar mempunyai ketahanan dan tidak mudah bangkrut.

Dalam konteks kehidupan perekonomian sekarang ini, aspek lainnyapun harus diperhatikan seperti biaya zakat (pajak) untuk sektor gharimin sebaiknya juga dialokasikan guna menutupi ataupun meringankan utang rakyat atau negara miskin. Sehingga, masuk akal jika dengan konsep zakat ini sebagian anggaran negara kaya yang dipungut dari pajak ditasarufkan guna membayar atau meringankan utang negara-negara miskin.

f. Sabilillah (Kepentingan Umum)

Makna harfiah Sabilillah artinya jalan Allah mengarah pada praktek konkret di zaman Nabi, kitab kitab fiqih mengartikan sabilillah sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir. Tidak ada yang salah dengan tafsiran ini, namun tidak mencakup semua. Berpegang teguh pada maknanya yang harfiah seperti ini, akan mengurangi luasnya arti yang sebenarnya.

Dalam pengertian seperti ini, Masdar Masudi berpendapat bahwa dana zakat (pajak) untuk sektor Sabilillah bisa di-tasharruf-kan untuk:

a. Penyelenggaraan sistem negara (al-hukumah) yang melayani kemaslahatan rakyat, baik jajaran legislatif (Suriah) nya maupun eksekutif (tanfidiyah) nya
b. Memberikan perlindungan yang aman bagi warga negara atau komunitas dari kekuatan yang merusak terhadap hak asasi manusia dan kewarganegaraan mereka yang sah
c. Memberikan keadilan hukum yudikatif bagi warga negara serta gaji aparat nya seperti polisi, jaksa, hakim, pembela hukum dan perangkat administrasinya
d. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum, sarana transportasi dan komunikasi, lingkungan hidup yang sehat dan lestari, dan lainnyayang berkaitan dengan hajat orang banyak
e. Peningkatan kualitas manusia guna memenuhi kewajiban sosialnya untuk ta'mir al-ardh (membangun peradaban filsafat ilmu dan teknologi)
f. Upaya lainnya yang secara konsisten diarahkan untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia

g. Ibn Al-Sabil (Tunawisma dan Pengungsi)

Para fuqoha sejauh ini menafsirkan ibn al-sabil sebagai "seorang musafir yang kekurangan bekal". Penafsiran ini benar dan masih relevan sampai sekarang. Namun, pemahaman ini tidak mencakup keseluruhannya.

Sehingga, mengenai pen-tasharruf-an dari biaya zakat untuk ibn al-sabil, kita bisa mengalokasikannya, tidak hanya untuk musafir yang kehabisan perbekalan, tetapi juga untuk kebutuhan para pengungsi baik karena alasan politik maupun untuk alasan peristiwa ekologis atau bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, kebakaran, tsunami, dan sebagainya.[104]

Pembagian delapan asnaf diatas selaras dengan UUD 1945 bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, pasal 34 yang menyatakan bahwa : *"(1). Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."* Pasal ini merupakan bentuk jaminan negara atas nasib fakir miskin yang merupakan konsep zakat.

[104] Ibid., hal. 128

BAB IV
PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Fungsi Instrumen Pajak dan Zakat dalam Kebijakan Fiskal

1. Pajak sebagai fungsi kebijakan fiskal

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan dari dalam negeri.[105] Fungsi alokatif adalah fungsi pengalokasian dana untuk kebutuhan pribadi dan fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan umum, semua dengan tujuan untuk keseimbangan.[106] Pemerintah membutuhkan pajak sebagai sumber pendanaaan untuk biaya pengeluaran negara saat ini, membangun dan meningkatkan infrastuktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran lain yang tidak dapat dihindari.[107]

Fungsi distribusi pajak adalah untuk mendukung pemerintah dalam menghimpun dana untuk kegiatan pembangunan guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan penduduk.[108] Kegiatan distribusi pajak meliputi kegiatan alokasi anggaran untuk setiap area perbaikan atau berpotensi layanan/organisasi atau kantor daerah. Demikian juga, layanan atau yayasan dan kantor daerah memanfaatkan anggaran untuk menjalankan proyek mereka.[109] Dana yang ditransfer dari sektor swasta ke sektor publik digunakan untuk biaya proyek yang bermanfaat bagi penduduk yang berpenghasilan rendah.[110] Dengan adanya pemungutan pajak, negara dapat menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, memberikan perumahan bersubsidi bagi masyarakat, dan memberikan bantuan untuk kebutuhan dasar dan lain-lain.[111]

Stabilitas pajak adalah alat manajemen pemerintah yang digunakan untuk mengendalikan inflasi, memproses harga, dan mengatur arus moneter dalam suatu

---

[105] Amiruddin Idris, *Ekonomi Publik*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 92

[106] Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Prespektif Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015, hal. 62

[107] Ibid., hal. 105

[108] Adolf Bastian Heatubun, dkk, *Analisis Pelaksanaandan Pengaruh Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di DKI Jakarta tahun 2012*, Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi, Vol. 17, No. 1, 2013, hal. 7

[109] Tim Edukasi Perpajakan DJP, Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: DJP Kementrian keuangan RI, 2016, hal. 142

[110] Afif Noor, Thesis: Hubungan Zakat dengan Pajak dalam UU No 38 Tahun 1999 dan UU No 17 tahun 2000, Semarang: UNDIP Semarang, 2003, hal.72

[111] Rosdiana, haula, dan Tarigan Rasin, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, hal. 16-17

masyarakat.[112] Pemerintah menggunakan intervensi anggaran untuk mempengaruhi pertumbuhan dan tingkat kegiatan ekonomi, yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian. Menstabilkan perekonomian dengan menyesuaikan pengeluaran negara atau pajak. Pada saat ekonomi berada di bawah output potensial atau terjadi penurunan, maka pemerintah merespons dengan kebijakan fiskal dengan cara melakukan peningkatan pengeluaran negara ataupun mengurangi pajak, yang mengarah pada peningkatan defisit anggaran. Di sisi lain, jika ekonomi berada di atas output potensial atau terjadi ekspansi, maka kebijakan fiskal akan mengurangi defisit anggaran dengan meningkatkan pajak atau memotong belanja negara.

Pada saat krisis, pendapatan masyarakat turun, dan pajak pendapatan juga turun. Pengurangan pajak penghasilan secara otomatis akan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat yang meningkat, hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan pembangunan ekonomi. Fungsi ini biasa dikenal dengan *automatic stabilizer*.[113]

Pengenaan pajak yang tinggi dalam tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara, pada dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah kebijakan pemerintah sepanjang tidak mengganggu makro ekonomi, investasi, dan inflasi. Penerimaan pajak tersebut tentunya dapat meningkatkan pengeluaran-pengeluaran yang telah dianggarkan dalam anggaran negara, seperti untuk membayar kenaikan gaji aparatur negara, pembelanjaan untuk subsidi, pembayaran beban utang luar negeri, dan pembiayaan pembangunan infrastruktur fisik. Mekanisme pajak yang demikian tentunya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.[114]

2. Zakat Sebagai Fungsi Kebijakan Fiskal

Zakat mengalihkan sebagian pendapatan orang kaya kepada orang miskin. Hal ini secara langsung akan meningkatkan kebutuhan masyarakat miskin akan barang dan jasa, yang biasanya mencakup kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Tingginya permintaan kebutuhan sosial dasar yang terkait dengan zakat akan mempengaruhi struktur produksi barang dan jasa yang dihasilkan

---

[112] Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2012, hal. 62

[113] Supian Sauri dan Muktirrahman, Artikel: Pajak dan Zakat Ditinjau dari Trilogi Fungsi Kebijakan Fiskal, Malang: UIN Maliki Malang, 2017, hal. 257

[114] Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2012, hal. 63

dalam perekonomian, sehingga alokasi sumber daya akan bergeser ke sektor-sektor yang lebih sesuai dengan kebutuhan sosial. Hal ini akan meningkatkan efisiensi alokasi dalam perekonomian.[115] Dalam hal ini, kita dapat melihat fungsi alokatif dari zakat yang merealokasikan sumber daya dari si kaya kepada si miskin mampu menjadi alat yang efektif untuk memerangi kemiskinan. Sehingga zakat ini akan mengubah fakir miskin menjadi muzaki.

Menurut Manan, anggaran belanja dalam islam di alokasikan untuk beberapa hal seperti : (a) Pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, (b) Pengeluaran militer dan pertahanan, termasuk pembayaran pensiun militer beserta keluarga yang ditinggalkan, (c) Pelayanan administrasi, (d) Setiap kegiatan negara dalam pelayanan publik dengan kompleksitas dalam pengelolaan dan pembayaran gaji aparatur negara, (e) Jaminan keamanan sosial, (f) Pemberian sumbangan dan pensiunan untuk tentara dan warga senior yang telah memberikan kontribusi banyak kepada islam, (g) Pendidikan, (h) Proyek pembangunan.[116]

Zakat adalah komponen keuangan dan alat distribusi yang utama pada awal berdirinya Negara Islam. Hal ini dikarenakan zakat dikumpulkan dari orang-orang berharta dan diberikan kepada orang-orang kekurangan, itu adalah instrumen yang berhasil untuk mengarahkan penghasilan ke berbagai bagian masyarakat.[117] Zakat harus memiliki efek pemberdayaan pada masyarakat dengan daya beli rendah. Jadi, dengan adanya peningkatan pada daya beli orang-orang miskin, zakat secara langsung menaikkan pertumbuhan permintaan masyarakat sehingga mendorong peningkatan penawaran. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat output juga akan meningkat. Oleh karena itu model penyaluran zakat tidak hanya memiliki efek menghilangkan kemiskinan secara penuh tetapi juga dapat menjadi pendorong bagi perkembangan di tingkat ekonomi makro.[118]

Sasaran distribusi zakat, sudah dicantumkan dalam Q.S. At-taubah: 60:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

---

[115] Kusniawati, Skripsi: Zakat sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam, Makassar: UIN Alaudin, 2011, hal.86

[116] Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Prespektif Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015, hal 94-95

[117] Sabahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2005), hal. 205

[118] Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 103

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Pada konsep pendistribusian zakat, mengidentifikasikan 8 subjek sebagai orang yang berhak menerima zakat (mustahik), yang pada dasarnya berarti bahwa zakat adalah bentuk hibah langsung. Redistribusi pendapatan dengan zakat bisa dengan cara melakukan transfer pembayaran secara langsung kepada orang-orang yang kekurangan, atau dengan menyediakan segala sesuatu yang bersifat umum untuk kepentingan masyarakat miskin, yang mempunyai efek redistributif yang kuat, misalnya menyediakan layanan kesehatan serta layanan sekolah dasar.[119] Zakat mempunyai fungsi redistributif , baik distribusi pendapatan faktorial atau maupun distribusi pendapatan individu. Zakat berlaku untuk aset dengan potensi pertumbuhan, termasuk modal fisik seperti bangunan atau pabrik maupun modal finansial (uang).[120]

Apabila dalam pajak fungsi stabilisasi digunakan dengan cara menaikkan dan menurunkan pajak, maka berbeda dengan zakat yang terfokus dengan keadilan distribusi dan uang zakat yang dimanfaatkan dengan baik. Yang dimaksud stabilisasi zakat disini adalah terbentuknya distribusi yang adil dan pengelolaan zakat yang lebih baik.[121] Kestabilan zakat adalah mengatur perekonomian masyarakat (umat), dimana kekayaan si kaya dan kekayaan sekelompok orang miskin didistribusikan secara merata hingga titik ekuilibrium (keseimbangan) tercapai.[122]

Zakat memiliki kontribusi yang signifikan dan sangat menentukan bagi perkembangan peradaban Islam pada umumnya. Makna zakat bagi ekonomi yakni: *Pertama,* zakat mampu melengkapi keperluan orang-orang yang membutuhkan. *Kedua,* zakat mampu menutup ketidak-seimbangan ekonomi. *Ketiga,* zakat

---

[119] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 20

[120] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 20

[121] Rahmi Septiyani, dkk. Artikel: *Asumsi Zakat sebagai Pengurang Pajak dalam Instrumen Kebijakan Fiskal Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000*, UIN Maliki Malang, 2015, hal. 218

[122] Rahmi Septiyani, dkk. Artikel: *Asumsi Zakat sebagai Pengurang Pajak dalam Instrumen Kebijakan Fiskal Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000*, UIN Maliki Malang, 2015, hal. 217

mampu mengurangi angka masalah kriminalitas seperti pelacur, orang miskin, peminta-minta, dan lain-lain. *Keempat,* zakat mampu menjaga daya beli publik untuk menopang bidang bisnis.[123] Dengan kata lain, zakat mampu menekan konsumsi masyarakat seminimal mungkin, sehingga perekonomian dapat terus berfungsi.

B. Prospek Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal Di Indonesia.

Pemikiran masdar masudi tentang adanya penyatuan zakat dan pajak, dimana zakat sebagai spirit atau roh yang merasuk pada pajak sebagai badannya. Roh dan badan tidak mungkin dipisahkan.[124] Dalam konsep agama, zakat bersifat personal dan ruhaniah, sedangkan konsep lembaga, zakat (pajak) bersifatsosial dan sekuler. Sehingga, muslim yangtelah menyetor pajaknya bersamaan niat dalam hati untuk memberikan zakat kepada lembagapemerintah, maka tanggungan agama mereka telah terpenuhi. Pemikiran ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pajak dan zakat di Indonesia. Meskipun gaya pemikiran beliau sangat ekstrim, namun sangat mengedepankan kemaslahatan umat.

Agama adalah kekuatan yang mampu menggerakkan hati nurani manusia yang terdalam untuk mencapai pengabdian kepada Tuhan dan melakukan tindakan shaleh. Negara adalah kekuatan yang dapat memaksa orang untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Ketika zakat sebagai ajaran agama diekspresikan dalam bahasa hukum yang nota bene adalah kebijakan negara, maka tidak ragukan lagi kemampuan zakat dalam mengatasi problem kesenjangan.[125]

Saat ini, usaha penyatuan pajak dan zakat dalam kebijakan fiskal di Indonesia, bisa kita lihat dengan diresmikannya zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Pernyataan tersebut, ada pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pada Pasal 9 ayat 1 huruf g menyebutkan bahwa zakat atas penghasilan yang secara nyata dibayarkan oleh wajib pajak muslim kepada lembaga BAZ/LAZ yang resmi dapat menjadi pengurang dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak..[126] Selanjutnya,

---

[123] Nurul Huda, dkk., *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 91

[124] Masdar Farid Masudi, *Pajak itu Zakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010, hal. 136

[125] Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, Departemen Agama RI: Dirjen Bimas Islam, 2008, hal. 93

[126] UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh

lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 22 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Ketetapan UU tersebut dianggap sebagai keputusan yang tepat. Kedua pasal ini menyebutkan bahwa muzaki yang telah membayar zakat kepada BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Usaha penyatuan pajak dan zakat ini sedikit melonggarkan beban muzakki yang juga berstatus sebagai wajib pajak dalam membayar zakat dan pajak. Meskipun zakat yang dikeluarkan oleh muzakki tidak secara langsung mengurangi pajak melainkan mengurangi penghasilan bruto.

Namun, penetapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belumlah sinkron dengan harapan para muzaki, dikarenakan zakat yang dilegalkan oleh undang-undang perpajakan berlaku pada zakat atas penghasilan saja. Sedangkan menurut islam, jenis zakat bukan hanya zakat atas penghasilan tetapi juga zakat atas harta lainnya.[127] Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola zakat dan minimnya keyakinan publik kepada lembaga pengelolaan zakat dan kurang tegasnya UU atas sanksi bagi para muzaki yang tidak berzakat. Dikarenakan UU yang berlaku saat ini hanyalah mengenai pengelolaan zakat semata.[128]

Pembayaran zakat yang hanya dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, mengartikan bahwa zakat tidak berbeda dengan biaya sosial (social cost) seperti sumbangan keagamaan sosial, perayaan hari besar, dan sejenisnya yang dipersamakan dengan sumbangan wajib keagamaan. Hal ini seakan mengecilkan makna zakat sebagai sumber pendapatan negara dimasa pemerintahan Rasulullah SAW, khulafaurrasyidin, dan para khalifah sesudahnya.[129]

Lain halnya di negara Malaysia, pengintegrasian zakat dan pajak sudah diterapkan dengan cara mengurangi pajak atas zakat yang sudah diangsurkan oleh muslim dan tidak dibatasi. Sebesar apapun angsuran zakat itu, akan dipotong dari pajak yang harus dikeluarkan. Asalkan zakat yang dibayarmasih di tahun taksiran

---

[127]Ali Muktiyanto, dkk, Zakat Sebagai Pengurang Pajak, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 4, No. 2, Septenber 2008, hal. 103

[128]Sofia fuadah dan Arif Afendi, *Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzaki di BAZNAS Kabupaten Semarang),* Jurnal At-Taqaddum, vol. 11, No. 2, November 2019, hal.157

[129] Gus fahmi, Pajak Menurut Syariah, edisi Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 296

yang sama dan membawa bukti dari Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia. Tujuannya untuk menghindari pajak berganda dari hasil pendapatan muzaki.[130]

Negara Malaysia jauh lebih baik dalam hal pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sehingga pemerintah Malaysia memiliki tanggungan atas kesejahteraan warga negaranya. pemberian kebebasan yang besar oleh pemerintah kepada penguasa untuk mengelola zakat, dan tidak ada intervensi pemerintah selama alokasi biaya zakat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, orang-orang yang kurang mampu dan lain-lain.[131]

Dalam pelaksanaannya, zakat tidak dianggap sebagai sumbangan amal melainkan sebagai sedekah wajib. Pernyataan ini mengartikan bahwa zakat adalah sedekah wajib atau setara dengan pajak. Tidak hanya itu, Athoillah sebagaimana dikutip Aidit Ghazali menyatakan bahwa ada tiga aspek dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat di Malaysia. *Pertama*, aspek jenis zakat yang dapat dikumpulkan oleh berbagai lembaga resmi. *Kedua*, aspek penuntutan atas berbagai kesalahan zakat. *Ketiga*, aspek jenis hukuman dan jumlah denda yang dijatuhkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum.[132] Dampak positif dari penerapan kebijakan ini adalah peningkatan penerimaan baik dari pajak maupun zakat.

Hal ini bisa dilihat dari laporan PPZ Malaysia tahun 2020 menunjukkan bahwa ada peningkatan penerimaan zakat yakni dari RM472 juta naik 8% menjadi RM511. 3 juta dari tahun sebelumnya.[133]Apabila pemberlakuan zakat sebagai pengurang pajak dilakukan di Indonesia, kemungkinan akan banyak hal yang baik yang akan terjadi, diantaranya:[134]

a. Akan ada peningkatan tarif pajak yaitu jumlah wajib pajak akan meningkat. Wajib pajak muslim akan lebih condong untuk membayar zakat atau pajak karena tidak lagi harus membayar dua kali
b. Kelompok yang kurang mampu akan tertolong. Apabila penyaluran biaya zakat melalui organisasi BAZ dan LAZ semakin banyak, maka semakin

---

[130] Eko Suprayitno, dkk, *Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap penerapan Pajak di Semenanjung Malaysia*, Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, vol. 7, No. 1, Juni 2013, hal. 5

[131] Syarif Hidayat Hasibuan, *Tax Rebate Policy: Relevansinya Dengan Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Indonesia,* Renaissance, No. 1 Vol. 5, Januari 2020, hal. 65

[132] Athoillah Islamy & Afina Aninnas, *Zakat And Tax Relations In Muslim Southeast Asian Countries (Comparative Study Of Zakat And Tax Arrangements In Indonesia, Malaysia And Brunei Darussalam)*, Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 5 , No.2, 2020, Hal. 107

[133] PPZ Malaysia, hal.53

[134]Ali Muktiyanto, dkk, *Zakat Sebagai Pengurang Pajak*, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 4, No. 2, Septenber 2008, hal. 103-104

banyak pula program untuk memberdayakan masyarakat yang terlaksana. Tentunya hal ini juga sangat bermanfaat bagi program pemerintah khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan.

c. Akan ada persyaratan bagi lembaga pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ, untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

Bahkan dalam urusan kebijakan fiskal, negara akhirnya bebas memainkan peran zakat. Zakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengalokasikan dananya kepada orang-orang yang kurang mampu. Karena memang kapasitas zakat menjadi jaminan sosial bagi kelompok kurang mampu. Dengan pengaturan Kementerian Keuangan, pada akhirnya para muzaki tidak dapat mengabaikan kewajiban mereka.. Asalkan zakat tersebut menjadi pengurang pajak. Pengurangan pajak pada hakikatnya tidak menurunkan penerimaan APBN, karena merupakan urusan kas negara dan kepentingan bersama. Menurut sejarah, zakat dikelola oleh negara dari zaman Nabi Muhammad SAW. Sampai dengan masa khalifah Umar bin Abdul Azis, dan berhasil memberikan kemakmuran kepada rakyatnya.[135] Jadi kami sangat berharap agar pemerintah mengelola zakat di Indonesia sejajar dengan administrasi perpajakan. Jika ada pemerataan dalam administrasi zakat dan pajak, maka sesuai studi di atas kemungkinan pengurangan pajak penghasilan atas zakat sebagai alternatif kebijakan perpajakan di indonesia akan lebih menjanjikan.

[135]TB. Mansur Ma'mun, Prospek Penerapan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal di Indonesia, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol.2, S1,September 2017, hal. 199

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul "Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Pajak dan Zakat dan Relevansinya Pada Kebijakan Fiskal Di Indonesia", yaitu:

1. Pajak dan zakat apabila ditinjau dari fungsi stabilitas, alokasi dan distribusi atau biasa disebut dengan trilogi fungsi kebijakan fiskal, keduanya adalah perpaduan yang saling menyempurnakan dan penting dalam penstabilan ekonomi. Dan keduanya mempunyai potensi serupa sebagai instrumen kebijakan fiskal.
2. Pemikiran masdar masudi tentang adanya penyatuan zakat dan pajak, dimana zakat sebagai spirit atau roh yang merasuk pada pajak sebagai badannya. Dalam konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal, sedangkan konsep kelembagaan zakat (pajak) bersifat profan dan sosial. Relevansi penyatuan pajak dan zakat dalam kebijakan fiskal di Indonesia dengan ditetapkannya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pernyataan ini terdapat pada UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pada Pasal 9 ayat 1 huruf g dan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 22 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Kedua pasal ini menyebutkan bahwa muzaki yang telah membayar zakat kepada BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat mengurangi penghasilan kena pajak.Namun, penetapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belumlah sesuai dengan harapan para muzaki, hal ini dikarenakan zakat yang diresmikan oleh UU perpajakan hanya zakat penghasilan. selain itu, kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola zakat dan kurang tegasnya UU atas sanksi bagi para muzaki yang tidak berzakat. Pembayaran zakat yang hanya dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, mengartikan bahwa zakat tidak berbeda dengan biaya sosial (social cost) seperti sumbangan keagamaan sosial, perayaan hari besar, dan sejenisnya yang dipersamakan dengan sumbangan wajib keagamaan. Lain halnya di negara Malaysia, pengintegrasian zakat dan pajak sudah diterapkan dengan cara mengurangi pajak atas zakat yang telah

dibayarkan oleh umat islam dan tidak terbatas. Apabila pemberlakuan zakat sebagai pengurang pajak dilakukan di Indonesia, kemungkinan banyak hal yang akan tejadi seperti: 1). Akan ada peningkatan tarif pajak yaitu jumlah wajib pajak akan meningkat, 2). Kelompok miskin akan terbantu, 3). Akan ada persyaratan bagi lembaga pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ, untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu *Transparency* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran).

B. Saran

1. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang integrasi antarazakat dan perpajakan, terutama pada masalah teknis, karenaorang pada umumnya masih bingung tentang hal ini.
2. Pensosialisasian oleh Dirjen Pajak dan BAZ/LAZ kepada publik bahwa zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak. Sekaligus melakukan transparansi pengelolaan BAZ/LAZ untuk membangun rasa percaya publik kepada lembaga BAZ/LAZ
3. Perlu dilakukan pembuatan UU yang tegas terkait sanksi yang dikenakan kepada muzaki yang tidak membayar zakat

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Adnan. 2019. *Kamus Pajak*. Yogyakarta: Andi.

Aini, Ihda. 2019. *Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam*, Al-Qishtu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2

Anshari, Muhammad Redha. 2016. Tesis : *Harmonisasi Peraturan Zakat dan Pajak dalam hukum Indonesia (Studi Tentang Zakat sebagai Pengurang Pajak)*. Yogyakarta: UII.

Arifin, Gus. 2011. *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-Dalil dan Keutamaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Arifin, Gus. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah (Dalil-Dalil Keutamaan).* Jakarta: PT Elex Media.

Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana

Azmi,Sabahuddin. 2005. *Menimbang Ekonomi Islam Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2005

Barkah, Qodariah, dkk, 2020, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf,* edisi pertama Jakarta: Prenadamedia Group

Bawazir, Mohamad Alfin. 2021. Skripsi: *Optimalisasi Pajak dan Zakat pada Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bin Abdul Aziz*. Purwokerto : IAIN Purwokerto

Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2008.*Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, Departemen Agama RI: Dirjen Bimas Islam

Fahmi, Gus. 2017. *Pajak Menurut Syariah*. Depok: Rajawali

Frida, Chatrina Vista Okta. 2020. *Hukum Pajak Di Indonesia Pengantar atau Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Garudhawaca

Fuadah, Sofia dan Arif Afendi. 2019. *Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzaki di BAZNAS Kabupaten Semarang),* Jurnal At-Taqaddum, vol. 11, No. 2.

Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.

Hasibuan,Syarif Hidayat. 2020.*Tax Rebate Policy: Relevansinya Dengan Kebijakan Pengelolaan Zakat Di Indonesia.* Renaissance. No. 1 Vol. 5

Heatubun, Adolf Bastian, dkk. 2013. *Analisis Pelaksanaandan Pengaruh Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di DKI Jakarta tahun 2012*, Jurnal Ilmiah Buletin Ekonomi, Vol. 17, No. 1.

Hidayat, Taufiq. 2013. *MenimbangPemikiran Masdar Farid Masudi Tentang Double Taxs (zakat dan Pajak).* Jurnal Economica. Vol. IV. Edisi 2.

Hidayatullah, Syarif. 2018. *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*. Jakarta: Indocamp

Huda, Nurul dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.

Huda, Nurul, dkk. 2015. *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Prespektif Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Huda, Nurul, dkk. 2016. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana

Idris, Amiruddin. 2016. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Islamy, Athoillah & Afina Aninnas. 2020.*Zakat And Tax Relations In Muslim Southeast Asian Countries (Comparative Study Of Zakat And Tax Arrangements In Indonesia, Malaysia And Brunei Darussalam).* Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam. Volume 5. No.2

Isnaeni, Desi. 2017. *Peranan Kebijakan Fiskal dalam Sebuah Negara*, Al-Intaj, Vol.3, No. 1.

Jalil, Abdul. 2019. *Mengenal zakat fitrah dan zakat mal*. Semarang: mutiara aksara.

Karim, Adiwarman. 2013. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kusnanto. 2019. *Belajar Pajak*. Semarang: Mutiara Aksara.

Kusniawati. 2011. Skripsi: *Zakat sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam*. Makassar: UIN Alaudin

Liliyana. 2018. Skripsi: *kewajiban penyatuan pajak dan zakat dalam pandangan didin hafidudin dan masdar farid masudi.* Lampung : UIN Raden Intan

Ma'mun, Mansur, TB. 2017. *Prospek Penerapan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan Sebagai Alternatif Kebijakan Fiskal di Indonesia.* Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol.2. S1

Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2018, Yogyakarta: C.V Andi Offset

Mardiasmo.2016. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016.* Yogyakarta: C.V Andi Offset

Marfu'ah, Usfiyatul. 2011. Skripsi: *Gagasan Masdar Farid Masudi Tentang Pajak itu Zakat (StudiAnalisis Manajemen Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat)*. Semarang : IAIN Walisongo.

Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia.

Mas'udi, Masdar Farid. 2010. *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: PT Mizan Pustaka

Muktiyanto,Ali dkk. 2008. *Zakat Sebagai Pengurang Pajak.* Jurnal Organisasi dan Manajemen. Vol. 4. No. 2.

Murtadho, Ali. 2013. *Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis*, Jurnal Economica, volume IV, Edisi 1.

Noor, Afif. 2003. Thesis: *Hubungan Zakat dengan Pajak dalam UU No 38 Tahun 1999 dan UU No 17 tahun 2000*. Semarang: UNDIP Semarang.

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Purwatiningsih, Aris Puji dan Muchlis Yahya. 2020. *Why Zakat Collection in Indonesia is not as Effective As It is in Malaysia.* Jurnal Penelitian. Vol. 14. No. 1.

Putong, Iskandar. 2013. *Economics, Pengantar Mikro Dan Makro, Edisi 5*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Bumi Aksara.

Rahma, Junita Kurnia. 2019. Skripsi*: Pajak Sebagai Solusi Pendukung Pembangunan*, Medan, UIN SU Medan

Ramdhan, Muhammad Rheza. 2017. *Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia*, Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 8 No. 1 1 Januari-Juni 2017

Ramandey, Lazarus. 2020. *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.

Rosdiana dan Tarigan Rasi. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Santana k, Septiawan. 2010. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sari, Depi Rianita. 2010. Skripsi: *Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah)*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.

Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo.

Sauri, Supian dan Muktirrahman. 2017. Artikel: *Pajak dan Zakat Ditinjau dari Trilogi Fungsi Kebijakan Fiskal*. Malang: UIN Maliki Malang.

Septiyani, Rahmi dkk. 2015. Artikel: *Asumsi Zakat sebagai Pengurang Pajak dalam Instrumen Kebijakan Fiskal Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000*, UIN Maliki Malang.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.

Sudirman, I Wayan. 2011. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori dan Empirikal*. Jakarta: Kencana.

Supangat. 2013. *Kebijakan Fiskal Negara Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Economica. Vol. IV. Edisi 2.

Suprayitno, Eko, dkk. 2013. *Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap penerapan Pajak di Semenanjung Malaysia.* Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, vol. 7, No. 1.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih.* Jakarta: Kencana.

Tim Edukasi Perpajakan DJP. 2016. *Materi Terbuka Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: DJP Kementrian keuangan RI.

Triantini, Zusiana Elly. 2013. *Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia (Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)*, Al-Ahkam: jurnal Pemikiran Hukum Islam vol. 23, No. 2,

Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kencana.

Zed, Mestika. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Pustakan Obor Indonesia.

https://money.kompas.com/read/2020/08/07/114100226/palsukan-faktur-pajak-wajib-pajak-ini-divonis-penjara-dan-denda-rp-20-5-miliar?page=all di akses pada tanggal 07/01/2021 pukul 10.18

https://money.kompas.com/read/2021/01/06/201315826/penerimaan-pajak-sepanjang-2020-capai-rp-1070-triliun-masih-kurang-rp-1288?page=all di akses pada tanggal 07/01/2021 pukul 09.36

UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh

PPZ Malaysia

LAMPIRAN



Cover Buku Pajak Itu Zakat



4
EVOLUSI KONSEP PAJAK

Tiba saatnya untuk menegaskan bahwa sejak awal sesungguhnya *zakat* adalah ajaran moral atau etika transendental untuk pajak serta pembelanjaannya, dan pada gilirannya juga untuk negara. Tesis ini bertolak dari kenyataan bahwa pajak adalah basis material dan darah kehidupan (*lifeblood*) negara dan kekuasaannya.[1] Tidak ada negara otoriter maupun demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa pajak rakyat. Pajak dibayar, negara tegak; pajak diboikot, negara ambruk. Jika diteorikan bahwa negara merupakan hasil *kontrak sosial*,[2] maka sesungguhnya ia lah "berpajak"-lah kontrak itu diberi isi dari hari ke hari

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

(2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang dikrarkan oleh pemberi.

(3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h. Pajak Penghasilan;

i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Fiki Riyani
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal, 11 Mei 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Ds. Dukuh Damu Rt 06/ Rw 01, Lebaksiu, Tegal
No. Telepon	: 085640774079
E-mail	: fikiei2000@gmail.com
Kewarganegaraan	: Indonesia
Riwayat Pendidikan	:

1. SD/MI : MI Assyafiiyah Dukuh Damu (2005-2011)
2. SMP/MTs : MTs Darul Mujahadah Margasari (2012-2014)
3. SMA/MA : MAN 1 Tegal (2015-2017)
4. Kuliah : UIN Walisongo Semarang

Tegal, 23 Desember 2021



Fiki Riyani